

PERATURAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 03 Tahun 2019

Tanggal : 25 Agustus 2019



**DOKEMEN
REVISI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM)
TAHUN 2017 S/D 2022**



Visi

“ Terwujudnya Nagari Ampang Tulak Tapan yang Mapan dalam Pemerintahan, Ulet dalam berekonomi, dan Masyarakatnya sejahtera lahir dan Batin “

**PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
KECAMATAN BASA AMPK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019**



PERATURAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2019

T E N T A N G
REVISI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJMNag)
TAHUN 2017 S/D 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPANG TUALK TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari perlu di laksanakan revisi RencanaPembangunan JangkaMenengahNagari (RPJMNag) yang berlakuselama 6(enam) Tahun ke depan,
- b. Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Revisi Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari,RPJMNag ditetapkan denganPeraturanNagari,
- c. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan Nagari Ampang Tulak tanggal 21 Agustus 2019; dan
- D bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampaic, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Ampang Tulak 2017 s/d 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
31. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 414.2/563/KM/DPMDPPKB-PS/1/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Revisi Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
dan

WALI NAGARI AMPANG TULAK TAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN TENTANG
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGARI (RPJMNag) TAHUN 2017 s/d 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Pariaman Selatan.
4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari di Nagari Ampang Tulak Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disingkat BAMUS adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari di Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Pesisir Selatan
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.
8. Pemerintah nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari tahun 2017 s/d 2022 yang selanjutnya disebut RPJMNag adalah dokumen perencanaan pembangunan nagari untuk periode 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2017 s/d 2022

- 11 Rencana pembangunan tahunan nagari, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 13 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 14 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program untuk mencapai visi.
- 15 Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Revisi RPJM Nagari Tahun 2017 s/d 2022 merupakan :

- (1) Penjabaran Visi, Misi, dan Program Wali Nagari terpilih ke dalam strategi Pembangunan Nagari, kebijakan umum, program prioritas Nagari dan arah kebijakan keuangan Nagari, dengan mempedomani RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
- (2) Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan nagari dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan;
- (3) Bahwa Revisi Rancangan RPJM Nagari merupakan sinkronisasi Pemendagri No 26 tahun 2008 dan pemendagri No 6 tahun 2014 dengan mempedomani kegiatan pusat RPJM.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tapan Tahun 2017 s/d 2022 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Nagari

Pasal 4

Tujuan Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tahun 2017 s/d 2022 sebagai pedoman dalam:

- (1) Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Nagari Ampang Tulak Tapan;
- (2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nagari (RKPN);

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tahun 2017 s/d 2022 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Pemerintah Nagari disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tahun 2017 s/d 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari pada akhir masa jabatan;

BAB IV

DOKUMEN RPJMNag AMPANG TULAK TAPAN TAHUN 2017-2022

Pasal 6

Dokumen Rancangan Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tahun 2017 s/d 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) BAB I : PENDAHULUAN
- 2) BAB II : PROFIL NAGARI
- 3) BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMNag
- 4) BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)
- 5) BAB V : PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tapan Tahun 2017 s/d 2022, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPN yang menjadi pedoman dalam

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tapan Tahun 2017 s/d 2022 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Nagari

Pasal 4

Tujuan Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tahun 2017 s/d 2022 sebagai pedoman dalam:

- (1) Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Nagari Ampang Tulak Tapan;
- (2) Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nagari (RKPN);

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tahun 2017 s/d 2022 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Pemerintah Nagari disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tahun 2017 s/d 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari pada akhir masa jabatan;

BAB IV

DOKUMEN RPJMNag AMPANG TULAK TAPAN TAHUN 2017-2022

Pasal 6

Dokumen Rancangan Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tahun 2017 s/d 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) BAB I : PENDAHULUAN
- 2) BAB II : PROFILNAGARI
- 3) BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMNag
- 4) BAB IV : VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)
- 5) BAB V : PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Revisi RPJMNag Ampang Tulak Tapan Tahun 2017 s/d 2022, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPN yang menjadi pedoman dalam

- (2) Revisi RPJM Nag Ampang Tulak Tapan Tahun 2017 s/d 2022 wajib dilaksanakan oleh Wali Nagari Ampang Tulak Tapan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nagari;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Nagari ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari Ampang Tulak Tapan.

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, untuk memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Ampang Tulak Tapan

Pada Tanggal 25 Agustus 2019

WALI NAGARI AMPANG TULAK



Diundangkan di Ampang Tulak Tapan

Pada Tanggal 25 Agustus 2019

SEKRETARIS NAGARI AMPANG TULAK TAPAN

LENI MARLINA S.Pd

LEMBARAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN TAHUN 2019 NOMOR 03

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Revisi RPJM) Nagari Ampang Tulak Tapan.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan dipernagkan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari.

Terima kasih kami ucapakan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan Fasilitator Kecamatan yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen Revisi RPJM, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Dokumen ini. Dan selama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan Revisi RPJM Nagari yang akan datang

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis dan Pembaca, Penulis dan Pembaca

Daftar Isi

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Manfaat dan Tujuan	3
4. Sistematika	4

BAB II KONSEP KONSEP

1. Pengertian Konsep	1
2. Fungsi dan Tujuan Konsep	2
3. Jenis-jenis Konsep	3
4. Cara-cara dan Metode	4
5. Manfaat dan Tujuan	5

BAB III PROSES PENYUSUNAN RENCANA KONSEP

1. Pengertian Konsep	1
2. Maksud dan Tujuan RENCANA KONSEP	2

BAB IV HASIL HASIL DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KONSEP

1. Hasil Konsep	1
2. Hasil Konsep	2
3. Hasil Konsep dan Tujuan Penyusunan Konsep	3

BAB V PENUTUP

Lampiran :

- 1. Hasil Konsep
- 2. Hasil Konsep, Program Kegiatan dan Tujuan
- 3. Hasil Konsep dan Tujuan Penyusunan Konsep
- 4. Hasil Konsep RENCANA KONSEP

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan peraturan Bupati No 563 tahun 2019 untuk Menyusun Revisi RPJM ini harus mempedomani undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari dan mengsinkronisasikan dengan RPJM Kabupaten Revisi RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Revisi RPJM Nagari antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi Nagari sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Wali Nagari tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan Revisi RPJM Nagari yang disusun dalam mencapai Visi dan Misi Nagari

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Ampang Tulak Tapan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Nagari kurun waktu 6 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Nagari (Pemerintah Nagari, Lembaga dan Masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Revisi RPJM) Nagari Ampang Tulak Tapan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional.

Dengan adanya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat. Diharapkan pula akan terbangun ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Diharapkan dengan adanya Revisi Rencana Pembangunan Jangka menengah Nagari Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat

1.2 Landasan Hukum Revisi RPJM Nagari

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017)
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 97 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Antar Desa Dalam Bidang Pemerintahan
21. Peraturan Pemerintah Desa No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (PD)
22. Peraturan Pemerintah Desa No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes
23. Peraturan daerah No 8 Tahun 2010 Tentang RPJP-D 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan
24. Peraturan daerah No 7 Tahun 2011 Tentang RT/RW 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.563 th 2019 tentang revisi RPJM nagari bagi wali nagari yang dilantik 2016-2017

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan Tujuan dilakukan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Ampang Tulak Tapan Periode Tahun 2017-2022 antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah Nagari sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah Nagari.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Nagari Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

1.4 Manfaat

Adapun Manfaat dilakukan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Ampang Tulak Tapan Periode Tahun 2019-2022 antara lain :

- a. Lebih menjamin kesinambungan Pembangunan di Nagari.
- b. Sebagai pedoman dan acuan Pembangunan Nagari.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan Program Pembangunan Supra Nagari.
- e. Dapat mendorong Pembangunan Swadaya dari masyarakat.

BAB II PROFIL NAGARI

2.1 Sejarah Nagari

Nagari Ampang Tulak Tapan yang pada mulanya adalah merupakan bagian dari Nagari Tapan salah satu dari 4 Nagari yang tergabung dalam kecamatan Pancung Soal ibu kotanya Inderapura.

Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, Nagari Tapan menjadi 17 pemerintahan Desa dan Ampang Tulak ini adalah salah satu Desa yang pada waktu itu namanya adalah Desa Malepang yang Luas Wilayahnya persis seperti Wilayah Nagari Ampang Tulak Tapan saat ini.

Pada tahun 1986 Tapan menjadi kecamatan perwakilan yang terdiri dari 17 pemerintahan Desa, kemudian pada tahun 1991 terjadi penggabungan Desa di kecamatan perwakilan Tapan, maka desa melepeng bergabung dengan Desa Bakir menjadi satu Desa, oleh tokoh masyarakat dari kedua Desa tersebut sepakat membuat nama Desa baru itu dengan nama " DESA AMPANG TULAK " yang diambilkan dari nama Bendungan Irigasi Sungai Batang Betung yang merupakan sumber air mengairi lahan pertanian Bakir, Malepang dan sekitarnya.

Berdasarkan PP. No. 50 tahun 1999 kecamatan Perwakilan Tapan dikukuhkan menjadi kecamatan definitif dengan nama kecamatan " BASA AMPEK BALAI TAPAN " yang terdiri dari 13 pemerintahan Desa, kemudian dengan keluarnya Perda Sumatera Barat No. 09 tahun 2001 tentang kembali pemerintahan Nagari, maka kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kembali menjadi 1 pemerintahan Nagari yaitu Nagari Tapan sedangkan Desa menjadi Kampung termasuk Desa Ampang Tulak menjadi beberapa Kampung yaitu, Kampung Bakir, Kampung Talang Sepakat, Kampung Air Batu dan Kampung Malepang.

Akhirnya dengan keluarnya Perda Pesisir Selatan No. 49 Tahun 2009, Nagari Tapan dimekarkan menjadi 8 Nagari termasuk diantaranya Ampang Tulak yang wilayahnya terdiri dari Kampung Talang Sepakat, Sungai Rumbai, Air Batu dan Malepang dengan nama Nagari " AMPANG TULAK TAPAN " pada tanggal 15 Januari 2010 Bupati Pesisir Selatan Melantik 8 Wali Nagari Definitif termasuk Wali Nagari Ampang Tulak Tapan yaitu " DARMANSYAH".

Dan pada tahun 2011 Nagari yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan di mekarkan lagi menjadi 20 Nagari.

2.2 Peta Nagari dan Kondisi Nagari

2.2.1 Gambar Sketsa Nagari (Peta Pemerintahan Nagari)



2.2.2 Kondisi Geografis Nagari

A. Batas-batas Administrasi Pemerintahan Nagari Ampang Tulak Tapan.

Nagari Ampang Tulak, kecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 8 Nagari di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang mempunyai jarak 146 Km dari kota kabupaten. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sendiri merupakan salah satu dari 12 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin. Secara geografis Nagari Ampang Tulak sendiri terletak sebelah utara Nagari Bukit Buai Tapan, timur Nagari Talang Koto Pulai, dan selatan berbatasan Nagari Riak danau Tapan dan Nagari Tapan Nagari Ampang Tulak letak topografis tanahnya berbukit, dataran, rawa dan terdiri dari beberapa anak sungai dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Ampang Tulak terdiri dari 2 Kampung, dengan potensi perangkaiya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), dua orang kasi dan dua Orang Kaur, Satu Orang Bendahara dan 2 orang Kepala Kampung, mempunyai jumlah penduduk 3010 orang yang terdiri dari 1521 laki-laki, 1489 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 310 RTM.

Nagari Ampang Tulak Tapan terdiri dari 2 (Dua) Kampung antara lain :

1. Kampung Air Batu
2. Kampung Simpang Hulu

B. Luas Wilayah Nagari

Luas Wilayah Nagari Ampang Tulak Tapan 45,25 Hektar dengan batas-batas Administrasi Pemerintahan Nagari Ampang Tulak Tapan, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan	: Nagari Bukit Buai
Sebelah Selatan berbatas dengan	: Nagari Riak Danau
Sebelah Barat berbatas dengan	: Samudra Indonesia
Sebelah Timur berbatas dengan	: Talang Koto Pulau tapan

❖ Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Belum ada	Pernag Nomor...	Ada
	Pernag No.....	

Menurut Penggunaan Lahan yang ada di Nagari Simpang Gunung Tapan sebagai berikut :

Tabel II.1. Penggunaan Lahan / Hutan di Nagari Simpang Gunung Tapan

Luas pemukiman	1200 Ha
Luas persawahan	25 Ha
Luas perkebunan	1200 Ha
Luas kuburan	5 Ha
Luas pekarangan	8 Ha
Luas taman	0 Ha
Perkantoran	10 Ha
Luas prasarana umum lainnya	3,5 Ha

Sawah irigasi ½ teknis	550 Ha
Sawah tadah hujan	0 Ha
Tegal/ladang	12 Ha
Pemukiman	0,45 Ha
Pekarangan	10 Ha
Tanah rawa	2450 Ha
Lahan gambut	0 Ha
Tanah perkebunan rakyat	162 Ha
Tanah perkebunan negara	-
Tanah perkebunan swasta	-
Tanah perkebunan perorangan	500 Ha
Kas Nagari	- Ha
Lapangan olahraga	- Ha
Perkantoran pemerintah	2 Ha
Tempat pemakaman umum	1,5 Ha
Bangunan sekolah / perguruan tinggi	Ha
Jalan	- Ha
Cagar budaya	-

TANAH BASAH	JUMLAH
Tanah rawa	- Ha
Pasang surut	-
Lahan gambut	- Ha
Situ/waduk/danau	-
Total	342 Ha

TANAH KERING	JUMLAH
Tegal/ladang	12 Ha
Pemukiman	0,45 Ha
Pekarangan	- Ha
Total	1245 Ha

TANAH HUTAN	
Hutan lindung	-
Hutan produksi	-
Hutan Produksi tetap	-
Hutan terbatas	-
Hutan konservasi	-
Hutan adat	-
Hutan asli	-

C. Iklim

Curah hujan	250 Mm
Jumlah bulan hujan	4bulan
Kelembapan	25,00
Suhu rata-rata harian	30,00 °C
Tinggi tempat dari permukaan laut	0,00 mdl

D. Jenis dan kesuburan tanah

Warna tanah (sebagian besar)	Hitam
Tekstur tanah	Pasiran
Tingkat kemiringan tanah	5,00 derajat
Lahan kritis	-
Lahan terlantar	-Ha
Tingkat erosi tanah	-
Luas tanah erosi ringan	-
Luas tanah erosi sedang	-
Luas tanah erosi berat	-

E. Topografi

Bentangan wilayah	YA/TIDAK	LUAS
Nagari dataran rendah	Ya	70 Ha
Nagari berbukit-bukit	Ya	70 Ha
Nagari dataran tinggi/pegunungan	Ya	40 Ha
Nagari lereng gunung	Tidak	-
Nagari tepi pantai/pesisir	Tidak	-
Nagari kawasan rawa	Ya	700 Ha
Nagari kawasan gambut	Ya	350 Ha
Nagari aliran sungai	Tidak	-
Nagari bantaran sungai	Ya	5 Ha
Nagari kawasan perkantoran	Tidak	-
Nagari kawasan pertokoan/bisnis	Tidak	-
Nagari kawasan campuran	Tidak	-
Nagari kawasan industri	Tidak	-
Nagari kepulauan	Tidak	-
Nagari pantai/pesisir	Tidak	-
Nagari kawasan hutan	Tidak	-
Nagari taman suaka	Tidak	-
Nagari kawasan wisata	Tidak	-
Nagari perbatasan dengan negara lain	Tidak	-
Nagari perbatasan dengan provinsi lain	Tidak	-
Nagari perbatasan dengan kabupaten lain	Tidak	-
Nagari perbatasan antar kecamatan lain	Ya	7 Ha
Nagari rawan banjir	Ya	1 Ha
Nagari bebas banjir	Ya	450 Ha
Nagari potensial tsunami	Tidak	-

ORBITASI	JARAK/WAKTU
Jarak ke ibu kota kecamatan	8 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	25 Menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	3 Jam
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	150 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	4 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	6 Hari
Jarak ke ibu kota provinsi	239,00 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	6,00 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	10 Hari

a. PERTANIAN

✓ **TANAMAN PANGAN**

1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	335 Keluarga
Tidak memiliki	67 keluarga
Memiliki kurang 1 ha	180 keluarga
Memiliki 1,0 – 5,0 ha	120 keluarga
Memiliki 5,0 – 10 ha	28 keluarga
Memiliki lebih dari 10 ha	7 keluarga
Jumlah total keluarga petani	402 keluarga

2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini

Jagung	15 Ha	195 Ton/ha
Kacang kedelai	-	-
Kacang tanah	-	-
Kacang panjang	-	-
Kacang mede	-	-
Kacang merah	-	-
Padi sawah	100 Ha	680 Ton/ha
Padi ladang	-	-

✓ **PERKEBUNAN**

1. Pemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	Keluarga
Tidak memiliki	Keluara
Memiliki kurang dari 5 ha	210 Keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	52 Keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	-
Memiliki 100 – 500 ha	-
Memiliki 500 – 1000 ha	-
Memiliki lebih dari 1000 ha	-
Jumlah total keluarga perkebunan	262 Keluarga
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara	-
Total Luas Perkebunan	789 Ha

2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

Jenis	Swasta/negara		Rakyat	
	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)
Kelapa	-	-	-	-
Kelapa sawit	-	-	500 Ha	20.000 kw/ha
Kopi	-	-	-	-
Cengkeh	-	-	-	-
Coklat	-	-	-	-
Pinang	-	-	-	-
Lada	-	-	-	-
Karet	-	-	31 Ha	17,8 kw/ha
Jambu Mete	-	-	-	-
Tembakau	-	-	-	-
Pala	-	-	-	-
Vanili	-	-	-	-
Jarak pagar	-	-	-	-
Jarak kepyar	-	-	-	-
Tebu	-	-	-	-
Kapuk	-	-	-	-
Kemiri	-	-	-	-
Teh	-	-	-	-

✓ **KEHUTANAN**

1. Luas Lahan Menurut Pemilikan

Milik Negara	-
Milik Adat/Ulayat	-
Perhutani/Instansi Sektoral	-
Milik masyarakat perorangan	-
Total	-

✓ **PETERNAKAN**

1. Jenis populasi ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	10 orang	164 ekor
Kerbau	5	10 ekor
Babi	-	-
Ayam kampung	182 KK	565 ekor
Jenis ayam broiler	-	-
Bebek	13 orang	41 ekor
Kuda	-	-
Kambing	15 orang	67 ekor
Domba	-	-
Angsa	1 orang	5 ekor
Burung puyuh	-	-

Kelinci	-	-
Burung walet	1 orang	36 ekor
Anjing	10 orang	15 ekor
Kucing	83 orang	149 ekor

✓ SUMBER DAYA AIR

1. Potensi Air dan Sumber Daya Air

Sungai	Debit : sedang
Danau	-
Mata Air	Debit kecil
Bendungan/waduk/situ	-
Embung-embung	-
Jebakan air	-

2. Sumber Air Bersih

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
Mata air	-	-	-
Sumur gali	436	436	B
Sumur pompa	-	-	-
Hidran umum	-	-	-
PAM	-	-	-
Pipa	-	-	-
Sungai	1	5	B
Embung	-	-	-
Bak penampung air hujan	-	-	-
Beli dari tangki swasta	-	-	-

F. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari meliputi 2 (dua) Kampung

2.2.4 Keadaan Sosial

Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olah raga. Adat istiadat dan budaya masyarakat Nagari Ampang Tulak Tapan bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan. Aspek sosial budaya mencakup Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Agama, Pemuda dan Olahraga.

a. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan mencakup jumlah prasarana pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf dan angka kelulusan pada semua level sekolah. Sebagai terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Penduduk Menurut Indikator Pendidikan

INDIKATOR PENDIDIKAN	JUMLAH
Angka Partisipasi kasar/ murni SD/MI	
Angka Partisipasi Kasar/ Murni SLTP/ MTs	
Angka Partisipasi kasar/ murni SLTA	
Rasio guru/ murid TK/PAUD	
Rasio guru/ murid SD	
Rasio guru/ murid SLTP	
Rasio guru/ murid SLTA	
Jumlah TK/PAUD	1
Jumlah SD	
Jumlah SLTP	1
Jumlah SLTA	
Angka melek buta huruf	
JUMLAH TOTAL	2

b. Aspek Kesejahteraan Sosial

Pada aspek Kesejahteraan Sosial, mencakup banyaknya penyandang masalah sosial menurut jenisnya sebagai berikut :

Tabel II.3 Penduduk Menurut Kesejahteraan Sosial

PENYANDANG MASALAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Tuna Rungu	1 Orang	-
Tuna Wicara	-	-
Tuna Netra	-	1 Orang
Lumpuh	-	1 Orang
Cacat Kulit	1 Orang	-

Cacat Mental	-	-
Idiot	1	-
Streets	-	1 orang
Gila	-	-

c. Aspek Kesehatan

Pada Aspek Kesehatan mencakup beberapa indikator pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Angka kematian bayi 0 orang dari jumlah bayi hidup 40 orang pada tahun 2017.
2. Angka harapan hidup 80 tahun 2017
3. Angka kematian ibu melahirkan 0 orang dari jumlah ibu yang melahirkan 40 orang.
4. Kondisi anak dengan kategori gizi buruk 0 %
5. Jumlah posyandu 1 (yandu Balita)
6. Jumlah Bidan Desa 1 orang
7. Jumlah jamban 350 dari kepala keluarga berjumlah 460 KK

d. Aspek Agama

Pada aspek agama mencakup struktur penduduk berdasarkan pemeluk agama, seratus Persen penduduk adalah pemeluk agama Islam. Data selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.4 Penduduk Menurut Agama

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	467 Orang	429 Orang
Kristen	—	—
Katholik	—	—
Hindu	—	—
Budha	—	—
Khonghucu	—	—

Prasarana Keagamaan meliputi Masjid, di Kampung Air batu ada 1 (Satu) buah Masjid, di Kampung Simp.Hulu ada 1 (Satu) buah Masjid.

e. Aspek Pemuda dan Olah Raga

Pada aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di Nagari Ampang Tulak Tapan di dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/ Prasarana yang disediakan untuk kegiatan kepemudaan dan olah raga serta kesenian meliputi :

- 1.Lapangan Sepak Takraw : -
- 2.Lapangan Bola Voli : 1 tempat
- 3.Lapangan Sepak Bola : 1 tempat

f. Aspek Kebudayaan

Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di Nagari ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : Seni Budaya, Randai, Badiki, Petatah Petitih Adat dan lain-lain.

2.2.5 Keadaan Ekonomi

Kegiatan perekonomian Nagari dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi,yaitu:

Tabel II.5 Prasarana Ekonomi

PRASARANA EKONOMI	JUMLAH
Toko/ Kios	24
Warung	20
Depot Air Minum	2
Tempat Fotocopy	0
Counter Pulsa Hp	
JUMLAH	46

Sementara untuk perkembangan Usaha Ekonomi Nagari sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan Kelompok Tani
2. Penyaluran modal usaha
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perekonomian Nagari

2.2.6 Kondisi Demografis Nagari

1. Penduduk menurut Jenis Kelamin / Gender :

Tabel II.6 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

NO	UMUR		JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2		3	4	5
1	0 - 11	Bulan	9	10	19
2	1 - 4	Tahun	30	40	70
3	5 - 14	Tahun	150	100	250
5	15 - 39	Tahun	220	230	450
4	40 - 64	Tahun	64	100	164
6	65	Tahun	25	45	70

2. Penduduk menurut Pendidikan :

Tabel II.7 Penduduk Menurut Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
I	Lulusan Pendidikan Umum	
	1. Taman Kanak-Kanak	60
	2. Sekolah Dasar	124
	3. SLTP	62
	4. SLTA	17
	5. Akademi (D1 - D3)	6
	6. Sarjana (S1 - S2)	39
II	Lulusan Pendidikan Khusus	
	1. Pendidikan Pesantren	-
	2. Madrasah	-
	3. Pendidikan Keagamaan	-
	4. Sekolah Luar Biasa	-
	5. Kursus / Keterampilan	-

Tabel II.8 Penduduk menurut Mata Pencapaian :

--JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	150 Orang	100 Orang
Pekebun	120 Orang	35 Orang
Buruh Kebun	100 Orang	75 Orang
Buruh migran perempuan	-	-
Buruh migran laki-laki	-	-
PNS	8 Orang	9 Orang
Pengrajin industri Rumah tangga	-	-
Pedagang keliling	3	2
Peternak	30 Orang	20 Orang
Nelayan	-	-
Montir	7	-
Dokter swasta	-	-
Bidan swasta	-	2
Perawat swasta	-	1
PRT	-	6 Orang
TNI	-	-
POLRI	-	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1 Orang	2 Orang
Pengusaha kecil dan menengah	-	-
Pengacara	-	-
Notaris	-	-
Dukun kampung terlatih	3	1
Jasa pengobatan alternatif	-	-
Dosen Swasta	-	-
Pengusaha besar	-	-

Tabel II.9 Penduduk menurut Kewarganegaraan

KEWARGANEGARAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Warga Negara Indonesia	467 Orang	429 Orang
Warga Negara Asing	-	-
Dwi kewarganegaraan	-	-

Tabel II.10 Penduduk menurut Etnis

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Nias	-	-
Batak	-	-
Minang	467 Orang	429 Orang
Jawa	-	-

2.3 Kelembagaan Nagari

Pemerintahan disini diartikan organisasi dan atau lembaga yang member pelayanan kepada masyarakat. Secara umum adanya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan Keputusan Pimpinan Daerah, adalah aturan main yang memberi gerak berjalannya lembaga-lembaga tersebut. Kelembagaan masyarakat adalah suatu himpunan norma-norma dari tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, dimana wujud konkritnya adalah asosiasi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUSNag) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat nagari yang mengacu pada pembangunan masyarakat.

Pemerintahan nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya

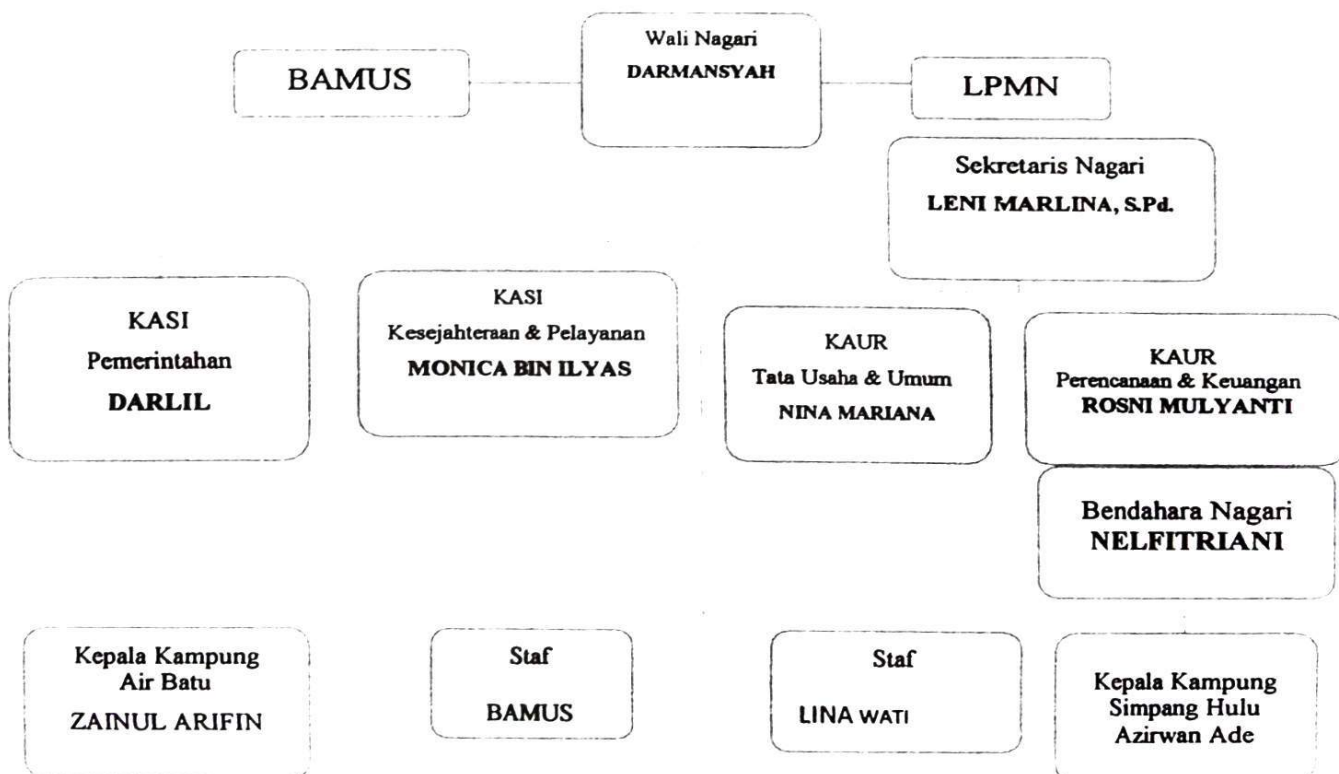
2.3.1 Struktur Organisasi Nagari

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas–tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS
2. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mencakup Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang Kasi, 2 (dua) Kepala Urusan, 2 (dua) orang Staf, dan 2 (dua) Kepala Kampung. Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BAMUS.
3. Wali Nagari memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Nagari, Kasi, Kepala Urusan, Staf, dan Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya staf urusan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan dan Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Nagari
6. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Wali Nagari dapat dibantu Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang ada.

1.3.2. STRUKTUR PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN TAHUN 2019



**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 64 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI**

2.3.2.1 Badan Permusyawaratan Nagri (BAMUS), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

NO	N A M A	J A B A T A N
1	LILI SYARYANI M.Pd	Ketua
2	BUDI SUSANTO	Wakil Ketua
3	MARTIAS	Sekretaris
4	MARDAMSYAH	Anggota
5	ROMI GUSPAIDI	Anggota

2.3.2.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| I. Ketua Umum | • Efendi S.Pd |
| II. Sekretaris I | • Nasri.S |
| III. Bendahara | • Sasra Mulyadi |
| IV. Seksi-seksi | |
| V. 1. Seksi Pembinaan Agama | • Sabri |
| VI. - Anggota | • Rabuha |
| 2. Seksi Pembinaan Adat | • Zailendra |
| - Anggota | • Jamaris |
| 3. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Keterampilan | • Asri manita |
| - Anggota | • Ida |
| 4. Seksi Pembinaan K-3 dan Lingkungan Hidup | • Rustam |
| - Anggota | • Andi |
| 5. Seksi Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana | • Ida Yuliana |
| - Anggota | • Yang Riani |
| 6. Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Kesenian | • Nasril |
| - Anggota | • Yan Basrizal |

- | | |
|---|-----------------|
| - Anggota | |
| 7. Seksi Pembinaan Perekonomian dan Koperasi | • Anastion |
| - Anggota | • doni |
| - Anggota | |
| 8. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana | • Zainul Arifin |
| - Anggota | • - |
| - Anggota | |
| 9. Keamanan dan Ketertiban | • Tamrin |
| - Anggota | • Bustami |
| - Anggota | • Irawani |
| 10. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | • |

2.3.2.3 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- I. Ketua Umum Nagari : Irawani
- II. Wakil Ketua : Megawati .S.Pd
- III. Sekretaris : Rina Susanti
- IV. Bendahara : Gita Nurani

V. Kelompok Kerja I (Pokja I)

- | | |
|---------|---------------------|
| Ketua | : Eka Susanti S.Pd |
| Anggota | : 1. Fiarita Marina |
| | 2. Yuli |
| | 3. Tuti Herawati |

VI. Kelompok Kerja II (Pokja II)

- | | |
|---------|----------------|
| Ketua | : Eni |
| Anggota | : 1. Mardianis |
| | 2. Karawati |
| | 3. Rosmaida |
| | 4. Rahmi |

VII. Kelompok Kerja III (Pokja III)

- | | |
|-------|-----------------|
| Ketua | : Ilda elmizola |
|-------|-----------------|

Anggota : 1. Dewi sartika
2. Eni Gusnida
3. oca

Kelompok Pokja IV (Pokja IV)

Ketua : Ida Yuliana Amd.keb

Anggota : 1. Yang Riani
2. Miswati
3. Zusmira weltis
4. Vina Juwita sari.Amd,keb

Karang Taruna, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Adriyanto

Sekretaris I : Tomi

Bendahara : Asvomeri

Ketua Pemuda Kampung : 1. Pandra Frinaldi
2. Yat

Tabel II.11 Kelembagaan yang ada di Nagari

NO	JENIS KELEMBAGAAN NAGARI	JUMLAH ANGGOTA / PENGURUS
1	Badan Permuyawaratan (BAMUS) Nagari	5 orang
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari	20 orang
3	Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Nagari	6 orang
4	BumNag	4 orang
5	Karang Taruna	5 orang
6	Majlis Ta'lim	100 orang
7	Posyandu	10 orang
8	Gapoktan	10 Orang
9	KPMN	5 Orang

Secara umum pelayanan Pemerintahan Nagari Ampang Tulak Tapan kepada masyarakat cukup memuaskan dan Kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

2.4 Dinamika Konflik

Secara umum, Dinamika konflik yang terdapat di Nagari Ampang Tulak Tapan antara lain :

Bidang Pemerintahan, antara lain: Kemampuan Aparatur yang belum memadai dalam administrasi dan pemahaman yang masih kurang tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bidang Kesehatan: Derajat Kesehatan masyarakat, khususnya ibu, bayi dan balita yang rendah, pola hidup yang tidak mendukung kesehatan, pengetahuan akan gizi yang rendah, dan sistem sosial budaya yang tidak mendukung kesehatan, khususnya bagi wanita dan anak-anak.

Bidang Pendidikan: masih cukup banyak anak usia dini, dan anak usia sekolah yang tidak menikmati pendidikan dasar (SD dan SMP), dan kualitas pendidikan yang rendah yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak yang tidak lulus UAN, nilai UAN yang rendah, kemampuan sekolah yang masih terbatas dalam memberikan honorarium kepada guru.

Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana: masih Banyak terdapat Jalan-jalan Usaha Tani dan Jalan Kampung serta Jembatan penghubung yang rusak dan berlubang, sehingga menyulitkan para Petani/Pekebun untuk membawa hasil panen untuk dijual, dan masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik.

Bidang Sosial Budaya: masih terdapat "rasa permusuhan" antar desa dan antar pemeluk agama dan cukup sering terjadi konflik terbuka dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, kelompok-kelompok kesenian daerah yang semakin kurang diminati, mulai diabaikannya kearifan lokal, tokoh-tokoh kharismatik yang lebih banyak berada di luar desa, pola hidup yang semakin konsumtif, pola pergaulan remaja yang semakin bebas, kebiasaan mabuk pemuda dan warga,

Bidang Lingkungan Hidup: sejumlah wilayah Hutan terus mengalami Pembalakan Hutan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya menghancurkan permukiman/rumah warga, wilayah perbukitan yang semakin gundul akibat pembukaan lahan pertanian/perkebunan, tanah longsor yang semakin tinggi intensitasnya.

Bidang Koperasi dan usaha masyarakat, tidak tersedia tenaga penyuluh koperasi, ketergantungan warga pada pelepas uang, kemampuan pengurus kelompok SPP yang masih lemah, biaya pemasaran yang tinggi karena tidak

tersedia angkutan umum/reguler, masyarakat belum memiliki kemampuan mengolah hasil pertanian dan perikanan,

Bidang Pertanian/Perkebunan: hasil pertanian/perkebunan terus menurun setiap tahun, termasuk karena serangan hama dan penyakit tanaman yang belum mampu di atasi sendiri oleh masyarakat, kesulitan dalam mendapat bibit yang baik, budidaya pertanian yang masih tradisional, tanaman kebun yang kurang dirawat dan harga hasil pertanian juga cenderung turun saat musim panen.

2.5 Masalah dan Potensi

2.5.1 Masalah

Bidang Pemerintahan, antara lain: Kemampuan Aparatur yang belum memadai dalam administrasi dan pemahaman yang masih kurang tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bidang Kesehatan: Derajat Kesehatan masyarakat, khususnya ibu, bayi dan balita yang rendah, pola hidup yang tidak mendukung kesehatan, pengetahuan akan gizi yang rendah, dan sistem sosial budaya yang tidak mendukung kesehatan, khususnya bagi wanita dan anak-anak.

Bidang Pendidikan: masih cukup banyak anak usia dini, dan anak usia sekolah yang tidak menikmati pendidikan dasar (SD dan SMP), dan kualitas pendidikan yang rendah yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak yang tidak lulus UAN, nilai UAN yang rendah, kemampuan sekolah yang masih terbatas dalam memberikan honorarium kepada guru.

Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana: masih Banyak terdapat Jalan-jalan Usaha Tani dan Jalan Kampung serta Jembatan penghubung yang rusak dan berlubang, sehingga menyulitkan para Petani/Pekebun untuk membawa hasil panen untuk dijual, dan masih banyak rumah tangga yang belum menikmati listrik.

Bidang Sosial Budaya: masih terdapat "rasa permusuhan" antar desa dan antar pemeluk agama dan cukup sering terjadi konflik terbuka dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, kelompok-kelompok kesenian daerah yang semakin kurang diminati, mulai diabaikannya kearifan lokal, tokoh-tokoh kharismatik yang lebih banyak berada di luar desa, pola hidup yang semakin konsumtif, pola pergaulan remaja yang semakin bebas, kebiasaan mabuk pemuda dan warga,

Bidang Lingkungan Hidup: sejumlah wilayah Hutan terus mengalami Pembalakan Hutan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya menghancurkan permukiman/rumah warga, wilayah perbukitan yang semakin gundul akibat pembukaan lahan pertanian/perkebunan, tanah longsor yang semakin tinggi intensitasnya.

Bidang Koperasi dan usaha masyarakat, tidak tersedia tenaga penyuluh koperasi, ketergantungan warga pada pelepas uang, kemampuan pengurus kelompok SPP yang masih lemah, biaya pemasaran yang tinggi karena tidak tersedia angkutan umum/reguler, masyarakat belum memiliki kemampuan mengolah hasil pertanian dan perikanan,

Bidang Pertanian/Perkebunan: hasil pertanian/perkebunan terus menurun setiap tahun, termasuk karena serangan hama dan penyakit tanaman yang belum mampu di atasi sendiri oleh masyarakat, kesulitan dalam mendapat bibit yang baik, budidaya pertanian yang masih tradisional, tanaman kebun yang kurang dirawat dan harga hasil pertanian juga cenderung turun saat musim panen.

2.5.2 Potensi

Beberapa potensi yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Nagari diantaranya:

Bidang Pemerintahan: Karakter masyarakat yang demokratis, karakter masyarakat yang terbuka, dan adat istiadat serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran.

Bidang Kesehatan: tersedianya tenaga penyuluh kesehatan, kader kesehatan, beragam tanaman tradisional berkasiat obat, dan kelompok – kelompok remaja yang aktif di bidang sosial.

Bidang Pendidikan: tersedianya sarana pendidikan khususnya pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP), kesadaran masyarakat akan pendidikan yang mulai tumbuh, sejumlah warga / pemuda yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, baik di universitas di daerah maupun luar daerah.

Bidang Sarana dan Prasarana: batu, pasir dan kerikil di sepanjang daerah aliran sungai, kayu dengan kualitas tinggi di hutan rakyat, dan sumber air bersih berupa mata air yang melimpah sepanjang tahun di beberapa wilayah desa.

Bidang Sosial Budaya: pola hubungan sosial yang egaliter / demokratis, terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang kharismatik dan kader-kader desa yang terlatih dalam pengorganisasian masyarakat dan mempunyai ketrampilan beberapa jenis olah raga dan kesenian tradisional.

Bidang Koperasi dan usaha masyarakat: terdapat kelompok-kelompok SPP, LKM, UKM, kelompok tani, kelompok Ternak dan organisasi keagamaan seperti pengajiandengan organisasi yang solid dan telah berpengalaman dalam simpan pinjam dan pengelolaan dana umat.

Bidang Perkebunan / Pertanian: lahan-lahan Perkebunan / pertanian yang luas dan relatif datar, kemampuan sebagian warga dalam budidaya dan tersedianya kotoran hewan, khususnya sapi dan kambing dalam jumlah yang cukup.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

1.1 Pengkajian Nagari

a. Pengertian

Pengkajian keadaan Nagari adalah Proses Penggalan dan Pengumpulan Data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat Nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

1. Potensi Nagari
2. Permasalahan yang dihadapi
3. Kebutuhan Masyarakat

c. Pendamping Desa

Kegiatan Pengkajian Nagari difasilitasi oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, BAMUS Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.

d. Pendekatan dan Metode

1. Penyelarasan Data Terbaru Nagari (lihat lampiran permendagri 114/2014)
2. Pengkajian Nagari dilakukan secara Partisipatif dengan menggunakan Metode Partipatory Rural Aprisal (PRA) melalui Sketsa Nagari, Diagram Venn dan Kalender Musim.
3. Solusi dan Tindakan

e. Alat Kajian dan Instrumen

Alat kajian yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan antar Lembaga. Instrumen yang digunakan adalah Form-form b (masukan) dan C (poses) sesuai lampiran Permendagri nomor 114 tahun 2014

f. Proses

1. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali Potensi, masalah dan kebutuhan Masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas
2. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
3. Memfasilitasi Masyarakat dimaksud melakukan pengkajian, tindakan, dan pemecahan masalah

g. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian kedaan Nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Nagari yang bersangkutan

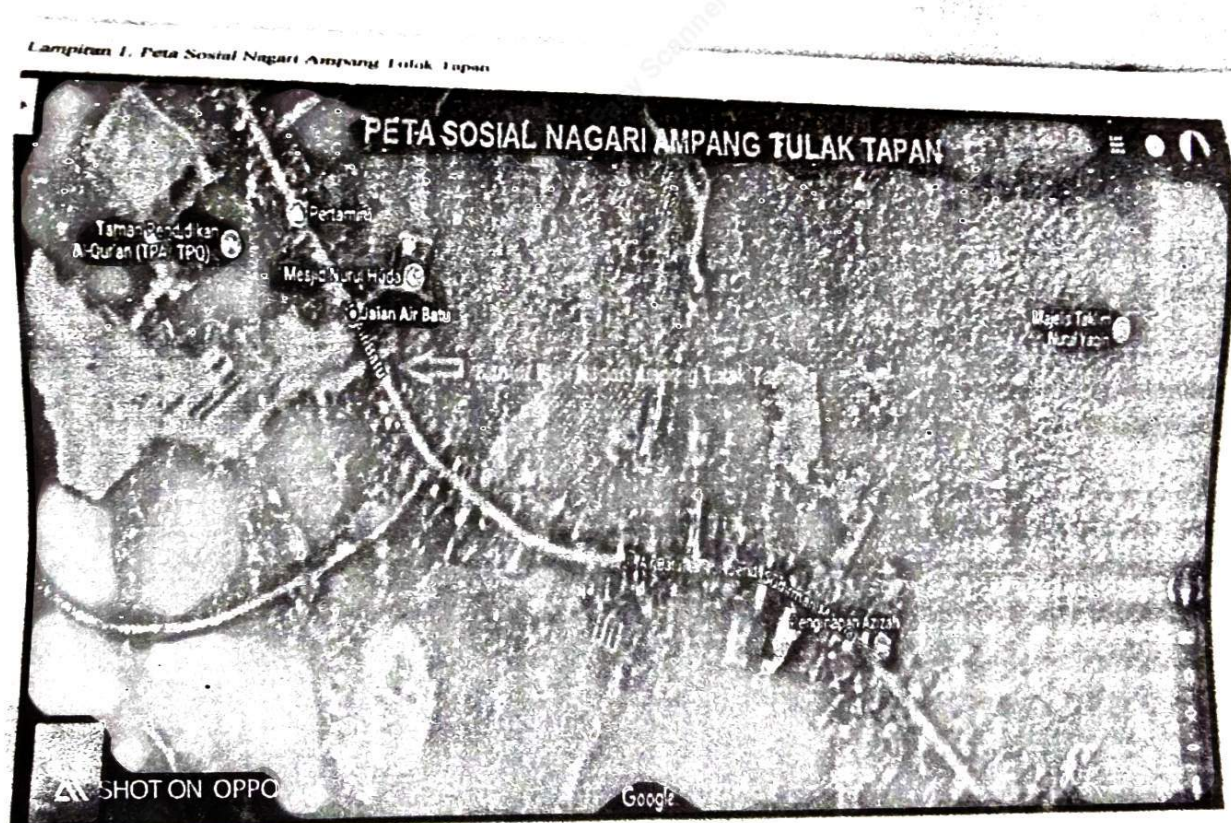
h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah :

1. Data Potensi Nagari
2. Data Permasalahan
3. Data Kebutuhan/Peringkat tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri Nomor 114 tahun 2014

Dari hasil Pengkajian Nagari / Investigasi Lapangan yang dilakukan Tim dalam melihat dan menginventarisir persoalan yang ada di Nagari Simpang Gunung Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai berikut:

3.1.1 Pengkajian Nagari menggunakan Sketsa Nagari



Daftar Masalah dari Potret Nagari bersumber dari hasil Pengkajian Nagari yang mencerminkan Daftar Masalah kondisi Prasarana, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Sosial-budaya, Keamanan dan Sumberdaya Perekonomian yang ada di Nagari.

Tabel 12. Masalah dari Sketsa Nagari

3.1.1.1 Data Awal Pengkajian keadaan Nagari menggunakan sketsa Nagari

No	Kampung	Masalah	Potensi
1.	Air Batu	1. Kurang lancarnya pembuangan air sehingga terjadinya banjir	Sawah atau lahan perkebunan ada
		2. Masyarakat Sulit untuk membeli bibit ternak sapi Unggul	Padang rumput ada dan kelompok Tani ada
		3. Sering terjadinya kekurangan air pada lahan persawahan	Lahan luas dan tenaga lokal ada
		4. Masyarakat sulit untuk mendapatkan bibit unggul	Petani dan lahan ada
		5. Belum mempunyai gedung Posyandu, Pertemuan dan Gedung Paud	Lahan ada dan tenaga lokal ada
		6. Sulitnya masyarakat membawa hasil usaha tani ke lokasi pemukiman penduduk	Lahan ada dan tenaga lokal ada
		7. Masyarakat kurang mengenal tentang	Minat masyarakat ada
		8. pendidikan komputer	
		9. Meningkatkan keterampilan menjahit	Masyarakat ada
		10. Kurangnya keterampilan tentang perbengkelan	Masyarakat ada
		11. Jalan tempat pemakaman umum masih becek	Jalan dan tenaga lokal ada
		12. Kurang mempunyai biaya orang tua murid untuk membayar honor guru PAUD	Gedung paud dan murid ada
		13. Tidak adanya gedung Wali Nagari Ampang Tulak	Lahan ada
		14. Banyaknya jumlah masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok	Lahan dan SDM ada
		15. Banyaknya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap	Lahan dan SDM ada
		16. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Pegawai Masjid	Masyarakat ada
		17. Tingginya minat masyarakat	Lokasi dan masyarakat

		untuk mengembangkan usaha kecil	ada
		18. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan bibit pertanian	Lahan pertanian ada
		19. Kurang lancarnya transportasi di bidang pertanian	Lokasi ada dan tenaga lokal
		20. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Sapi	Lokasi ada dan kelompok ada
		21. Masyarakat sulit mendapatkan ternak ayam	Lokasi ada dan kelompok ada
		22. Masyarakat sulit mengembangkan usaha karena tidak ada modal	Tempat ada dan kelompok ada
		23. Anak-anak usia dini belum mendapatkan pendidikan fisik	Anak-anak dan sekolah
		24. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak ikan	Lokasi ada
		25. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan bibit Holtikultura	Lahan ada
2.	Simpang Hulu	26. Sulitnya petani mengangkut hasil pertanian	Lahan dan tenaga lokal
		27. Jauhnya jarak gedung sekolah SMA, SD	Lahan dan tenaga lokal
		28. Banyaknya anak-anak usia TK tidak sekolah	Anak-anak dan lahan
		29. Banyaknya pemuda dan pemudi yang menganggur	Lahan dan tenaga lokal
		30. Masyarakat tidak buang air besar dan kecil pada tempatnya	Lahan dan tenaga lokal
		31. Anak-anak tidak belajar agama pada MDA	Lahan dan anak-anak
		32. Masyarakat tidak mempunyai sumber air bersih	Masyarakat dan lahan
		33. Jauhnya masyarakat pergi ke pasar untuk belanja	Lahan dan tenaga lokal
		34. Jauhnya anak sekolah setingkat SMA untuk kesekolah	Lahan dan tenaga lokal
		35. Orang tua tidak mampu membiayai anak sekolah	Anak-anak
		36. Kurangnya ilmu computer pada masyarakat dan anak-anak	Siswa ada
		37. Kurangnya minat orang tua murid untuk membayar honor guru TPA / TPSA	Guru ada dan murid ada
		38. Banyak anak-anak yang putus sekolah menganggur	Lahan dan tenaga lokal

			ada
		39. Guru TPATPSA belum mampu sepenuhnya untuk mengajar	Murid ada
		40. Masyarakat tidak mampu membeli bibit karet unggul	Lahan dan petani ada
		41. Masyarakat tidak mampu membeli bibit ikan nila	Lahan dan petani ada
		42. Masyarakat tidak mampu membeli alat-alat pertanian	Petani dan lahan
		43. Kurangnya dana dalam mengelola usaha	kelompok ada
		44. Semakin berkurangnya lahan pemukiman	Lahan ada dan tenaga lokal
		45. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat-obatan dan bibit pertanian	Lahan pertanian ada
		46. Banyaknya rumah tidak layak huni	Rumah tidak layak huni ada
		47. Kurang lancar transportasi menuju tempat perkebunan	Lahan ada dan tenaga lokal
		48. Tingginya minat masyarakat untuk usaha ternak Sapi	Lokasi ada
		49. Kurangnya minat masyarakat menikmati kesenian Qasidah / lagu Agamis	Masyarakat
		50. Kurangnya kapasitas masyarakat yang mampu merias pengantin	Kebutuhan masyarakat tinggi
		51. Banyaknya jumlah masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok	Lahan dan petani ada
		52. Masih kurangnya perlengkapan dan peralatan PKK	PKK dan tempat ada

2.2.1 Hasil Revisi Pengkajian keadaan Nagari menggunakan sketsa Nagari

No	Kampung	Masalah	Potensi
1.	Air Batu	1. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan ilmu teknis Bangunan	Masyarakat ada Tenaga lokal swadaya ada
		2. Kurangnya ilmu Ibu Rumah Tangga dan PKK Tentang resep memasak	Masyarakat ada PKK ada
		3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan anak-anak tentang pendidikan komputer	Masyarakat ada siswa ada swadaya ada
		4. Banyaknya Orang tua yang tidak mampu membiayai anak sekolah	Minat Anak-anak ada
		5. Kurangnya minat orang tua murid untuk membayar honor guru TPA / TPSA	Guru ada dan murid ada
		6. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang ketrampilan menjahit	Masyarakat ada
		7. Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam ketrampilan Perbengkelan	Masyarakat ada
		8. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi	Minat masyarakat membaca ada
		9. Banyaknya Tamatan SLTA yang tidak mampu untuk melanjutkan ke Perguruan tinggi	Anak ada, kemauan ada
		10. Masih banyak orang tua yang kurang mampu membeli pelengkapan sekolah anak	Anak ada
		11. Masih banyak masyarakat lanjut usia yang buta huruf	Masyarakat ada Tenaga lokal ada
		12. Kesejahteraan guru PAUD kurang	Guru ada
		13. Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	Kader ada
		14. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Miras	Masyarakat ada
		15. Masih banyak Bayi dan Ibu hamil yang kurang gizi	Bayi ada, ibu hamil ada
		16. Tidak adanya Kantor Wali Nagari	Lahan ada tenaga lokal
		17. Sulitnya masyarakat melewati jalan suka damai pada saat membawa hasil pertanian	Jembatan ada masyarakat ada dan tenaga lokal ada
		18. Kurang lancarnya aliran air sungai Bendungan Ampang Tulak sehingga terjadi banjir	Sungai ada sawah ada perkebunan ada tenaga lokal ada

	19. Sulitnya masyarakat membawa hasil tani ke pemukiman penduduk	Lahan ada tenaga lokal ada dan swadaya ada
	20. Jl menuju ke irigasi masih becek	Jalan ada swadaya ada tenaga lokal ada
	21. Kurang lancarnya transportasi di Bidang Pertanian	Lokasi ada tenaga lokal ada
	22. Pelebaran saluran irigasi amfang Tulak dan benda gedang sepanjang 1 km	Sawah ada perkebunan ada dan tenaga lokal
	23. Bendungan irigasi di kepala bandar di persawahan Ampang Tulak belum memadai	Lokasi ada swadaya ada tenaga lokal ada
	24. Belum adanya balai-balai di tempat pemakaman umum masyarakat untuk acara tradisi tahunan	Lokasi ada swadaya ada tenaga lokal ada
	25. Belum tersedianya gedung pertemuan pemuda	Lokasi ada swadaya ada tenaga lokal ada
	26. Lapangan sepak bola masih dalam keadaan darurat (miring dan tanah kuning)	Lapangan ada swadaya ada tenaga lokal ada
	27. Pagar kampung masyarakat belum seragam	Pagar ada swadaya ada tenaga lokal ada
	28. Masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni	Rumah Tidak layak huni ada
	29. Belum adanya irigasi persawahan yang memadai sehingga bercocok tanam hanya mengandalkan hujan	Persawahan ada, tenaga lokal ada
	30. Polindes belum mempunyai Peralatan yang lengkap	Lokasi ada swadaya ada tenaga lokal ada
	31. Pengaspalan jalan pematang luas sepanjang 2 km	Jalan ada swadaya ada tenaga lokal ada
	32. Belum ada pengeringan rawa pasung dilahan perkebunan masyarakat	Perkebunan ada masyarakat ada tenaga lokal ada
	33. Belum tersedia pasar tempat belanja masyarakat	Lokasi ada swadaya ada tenaga lokal ada
	34. Banyaknya anak usia dini yang belum mendapatkan pendidikan	Lokasi ada anak ada tenaga lokal ada
	35. Kurangnya kapasitas masyarakat yang mampu merias pengantin	Masyarakat ada swadaya ada
	36. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki surat nikah	Masyarakat ada swadaya ada
	37. Pengetahuan Pepatah adat dikampung masih kurang	Masyarakat ada swadaya ada
	38. Banyaknya Masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai Sunatan Rasul	Anak-anak ada dan Swadaya ada

	39. Kurangnya Khatib/ ustad untuk pengisian acara keagamaan	Masyarakat ada swadaya ada
	40. Tidak adanya penerangan jalan Masyarakat Sewaktu malam hari	Lokasi ada Swadaya ada tenaga lokal ada
	41. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pencak Silat Tradisional	Masyarkat ada dan swadaya ada
	42. Belum mempunyai alat musik tradisional (Rabana)	Pemain ada
	43. Sulitnya masyarakat mendapatkan bibit Karet unggul	Masyarakat ada lahan ada
	44. Sulitnya masyarakat mendapatkan bibit Padi unggul	Masyarakat ada lahan ada
	45. Sulitnya masyarakat mendapatkan bibit Jagung unggul	Masyarakat ada lahan ada
	46. Petani sering mengalami gagal panen	Petani ada dan lahan ada
	47. Masih banyak petani belum mengetahui tentang Gapoktan	Petani ada
	48. Masyarakat belum mempunyai ternak Bebek	Masyarakat ada dan lokasi ada
	49. Masyarakat belum mempunyai ternak ikan lele	Masyarakat ada dan lokasi ada
	50. Masyarakat belum mempunyai ternak ikan Rayo	Masyarakat ada dan lokasi ada
	51. Masyarakat belum mempunyai ternak ayam potong	Masyarakat ada dan lokasi ada
	52. Masyarakat belum mempunyai ternak Sapi Bali	Masyarakat ada dan lokasi ada
	53. Masyarakat belum mempunyai ternak ayam ras	Masyarakat ada dan lokasi ada
	54. Masyarakat belum mempunyai ternak ikan nila	Masyarakat ada dan lokasi ada
	55. Kurang modal bagi petani untuk mengolah lahan pertaniannya	Petani ada dan lahan ada
	56. Kurangnya Modal Bagi pedagang Kecil (Khusus Perempuan)	Pedagang ada kelompok ada
	57. Belum mempunyai wadah tempat penampungan untuk hasil pertanian	Lokasi ada dan tenaga lokal ada
	58. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang sepak bola	Guru ada, anak ada dan Lapangan ada
	59. Sulitnya masyarakat membawa hasil panen kedaearah pemukiman penduduk	Petani ada dan swadaya ada
	60. Akses jalan kekebun dan pelebaran wilayah	Petani ada dan swadaya ada
	61. Prasarana olah raga untuk	Guru ada, anak ada dan

		memasyarakatkan olah raga atau pun mengolah ragakan masyarakat	masyarakat ada
		62. Sulitnya masyarakat mendapatkan air di musim kemarau	Petani ada dan swadaya ada
		63. Kurangnya Pengetahuan masyarakat dibidang peternakan	Peternak ada
		64. Lahan persawen penduduk sering digenangi air/ banjir	Petani ada dan swadaya ada
2.	Simpang Hulu	65. Banyaknya anak usia dini yang belum sekolah	Anak ada
		66. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang ketrampilan menjahit	Minat masyarakat ada swadaya ada
		67. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan anak-anak tentang pendidikan komputer	Masyarakat ada siswa ada swadaya ada
		68. Jauhnya jarak gedung sekolah SMA, SD	Lahan ada dan tenaga lokal ada
		69. Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan informasi	Minat baca masyarakat ada
		70. Masih banyak masyarakat yang buta huruf	Peminat banyak swadaya ada
		71. Banyaknya Orang tua yang tidak mampu membiayai anak sekolah	Anak ada
		72. Kurang lancarnya transportasi menuju perkebunan	Lahan ada tenaga lokal ada
		73. Sulitnya masyarakat membawa hasil tani kedaerah pemukiman	Lokasi ada tenaga lokal ada
		74. Banyaknya Orang tua yang tidak mampu membiayai anak sekolah	Minat Anak sekolah ada
		75. Banyaknya lahan masyarakat yang digenangi air	Lahan ada swadaya ada tenaga lokal ada
		76. Sulitnya masyarakat untuk mengembangkan seni budaya	Tanah ada swadaya ada tenaga lokal ada
		77. Perluadanya prasarana kesehatan masyarakat	Lokasi ada swadaya ada tenaga lokal ada
		78. Belum adanya sarana prasarana olah raga sepak bola kaki	Lahan ada swadaya ada tenaga lokal ada
		79. Belum ada batas tugu kampung dan nagari	Lokasi ada tenaga lokal ada
		80. Jauhnya jarak tempuh masyarakat mendapatkan pengobatan	Lahan ada swadaya ada tenaga lokal ada
		81. Masyarakat tidak mempunyai air bersih	Masyarakat ada lokasi ada tenaga lokal ada
		82. Banyaknya ibu hamil yang kurang gizi	Bayi ada Ibu Hamil ada

	83. MCK M Mesjid belum memadai	Mesjid ada tenaga lokal ada
	84. Tidak adanya dana penunjang pada kader yandu	Kader ada tenaga lokal ada
	85. Banyaknya sampah masyarakat yang tidak pada tempatnya/merusak lingkungan	Lokasi ada swadaya ada tenaga lokal ada
	86. Kurangnya kapasitas masyarakat yang mampu merias pengantin	Masyarakat ada swadaya ada
	87. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki surat nikah	Masyarakat ada
	88. Pengetahuan Pepatah adat dikampung masih kurang	Masyarakat ada swadaya ada
	89. Banyaknya Masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai Sunatan Rasul	Anak ada Swadaya ada tenaga lokal ada
	90. Kurangnya Khatib/ ustad untuk pengisian acara keagamaan	Masyarakat ada Swadaya ada
	91. Tidak adanya penerangan jalan Masyarakat sewaktu Malam hari	Lokasi ada Swadaya ada tenaga lokal ada
	92. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pencak Silat Tradisional	Masyarkat ada Swadaya ada dan Tenaga Lokal ada
	93. Sulitnya masyarakat mendapatkan bibit Karet unggul	Masyarakat ada lahan ada
	94. Sulitnya masyarakat mendapatkan bibit Padi unggul	Masyarakat ada lahan persawahan ada
	95. Sulitnya masyarakat mendapatkan bibit Jagung unggul	Masyarakat ada lahan ada
	96. Petani sering mengalami gagal panen	Petani ada dan lahan ada
	97. Masih banyak petani belum mengetahui tentang Gapoktan	Petani ada
	98. Masyarakat belum mempunyai ternak Bebek	Masyarakat ada lokasi ada
	99. Masyarakat belum mempunyai ternak ikan lele	Masyarakat ada lokasi ada
	100. Masyarakat belum mempunyai ternak ikan Rayo	Masyarakat ada lokasi ada
	101. Masyarakat belum mempunyai ternak ayam potong	Masyarakat ada lokasi ada
	102. Masyarakat belum mempunyai ternak Sapi Bali	Masyarakat ada lokasi ada
	103. Masyarakat belum mempunyai ternak ayam ras	Masyarakat ada lokasi ada
	104. Masyarakat belum mempunyai ternak ikan nila	Masyarakat ada lokasi ada
	105. Kurang nya modal bagi petani untuk mengolah lahapertaniannya	Petani ada dan lahan ada
	106. Kurangnya Modal Bagi pedagang	Pedagang ada kelompok ada

		Kecil (Khusus Perempuan)	
		107. Belum mempunyai wadah tempat menampungan untuk hasil pertanian	Tanah ada dan tenaga lokal ada
		108. Belum selesainya (terbengkalai) pembangunan mesjid Nurul Yaqin di kampung simpang gunung	Masjid ada swadaya ada tenaga lokal ada
		109. Pembuatan jalan baru dari simpang gunung menuju ke talang medan	Lokasi ada swadaya ada dan tenaga lokal ada
		110. Kurangnya Pengetahuan masyarakat dibidang peternakan	Peternak ada

3.1.2 Pengkajian Nagari menggunakan Kalender Musim

KEGIATAN/ BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
A. IKLIM												
▪ HUJAN												
▪ KEMARAU												

Ket :

- * : Jarang terjadi
- ** : Kadang-kadang terjadi
- *** : Sering Terjadi

Daftar masalah dari **Kalender Musim** merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di Nagari setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Tabel 11. Masalah dari Kalender Musim

Data Awal Pengkajian keadaan Nagari menggunakan Kalender Musim

No	Kampung	Musim	Masalah	Potensi
1	Air Batu			
		KEMARAU	1.Masy kekurangan air Bersih 2.Hasil panen merosot/ Macet Produksi palawija menurun Anak menderita demam	Sungai Sungai, lhn pesawahan dan klp tani Postu
		HUJAN	1.Banyak masy yang ter Serang diare 2.Sebagian Rumah masyarakat Terendam Air 3.Hasil Palawija Menurun 4.Sebahagian masy tidak Bisa menyadap karet / Ekonomi macet	Posyandu dan Tenaga kesehatan SDM/petani
No	Kampung	Musim	Masalah	Potensi
2.	Simpang Hulu			
		KEMARAU	1.Masy kekurangan air Bersih 2.Hasil panen merosot/ Macet Produksi palawija menurun Anak menderita demam	Sungai Sungai, lhn pesawahan dan klp tani Postu
		HUJAN	1.Banyak masy yang ter Serang diare 2.Sebagian Rumah masyarakat Terendam Air 3.Hasil Palawija Menurun 4.Sebahagian masy tidak Bisa menyadap karet / Ekonomi macet	Posyandu dan Tenaga kesehatan SDM/petani

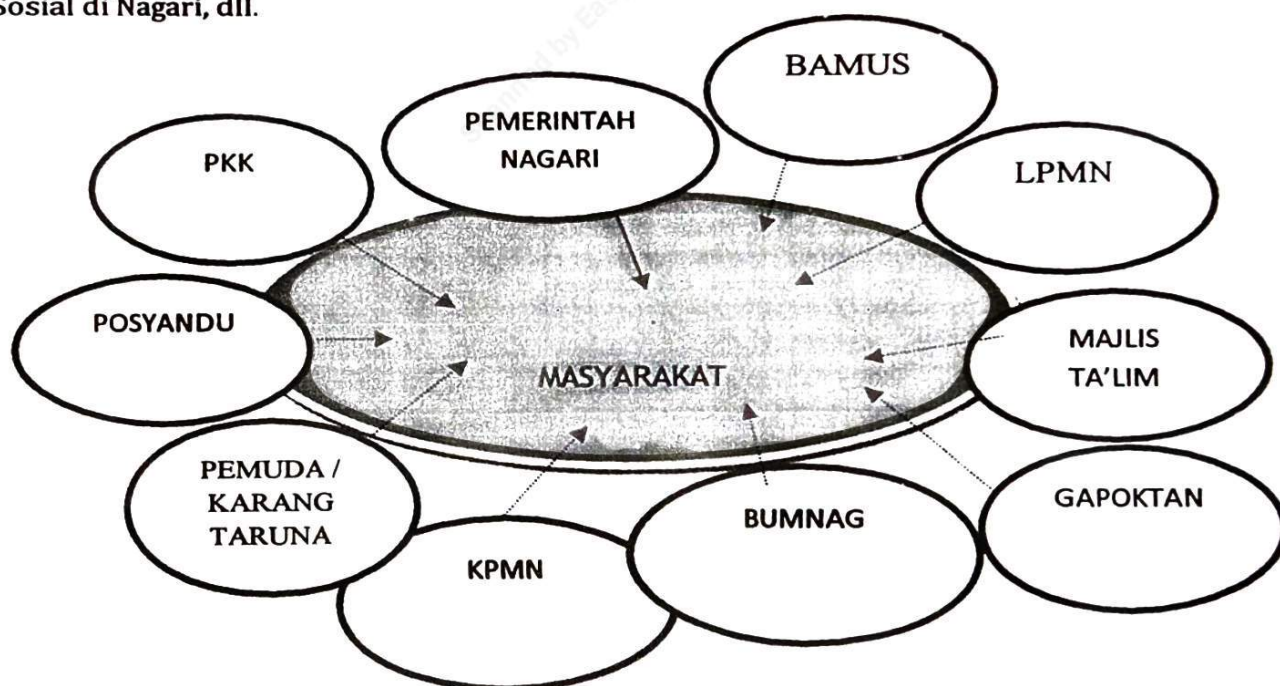
Hasil Revisil Pengkajian Keadaan Nagari Menggunakan Kalender Musim

No	Kampung	Musim	Masalah	Potensi
	Air Batu	KEMARAU	Masy kekurangan air Bersih	Sungai ada
			Hasil panen merosot / Macet	Lahan ada
			Anak menderita demam	swadaya ada
		HUJAN	Banyak masy yang ter Serang diare	Posyandu ada Tenaga

			Sebagian Rumah masyarakat Terendam Air	kesehatan ada Saluran pembuangan air ada tenaga lokal Swadaya ada
			Sebahagian masyarakat tidak Bisa menyadap karet Ekonomi macet	Lahan kebun karet ada
	Simpang Hulu	KEMARAU	Masy kekurangan air Bersih Hasil panen masyarakat merosot/ Macet Kebanyakan anak menderita demam	Sungai ada Lahan ada swadaya ada Anak ada tenaga kesehatan ada

3.1.3 Pengkajian Nagari menggunakan Diagram Venn (Kelembagaan)

Daftar masalah dari Bagan Kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di Nagari, seperti pada Pemerintah Nagari;, Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, LPMN, TP-PKK, Kader-Kader Nagari, Kelompok Tani/Ternak,Kelembagaan Simpan Pinjam (SPP), KAN, Lembaga Sosial di Nagari, dll.



Tabel 12. Masalah menggunakan Diagram Venn

Data Awal Pengkajian Keadaan Kelembagaan Menggunakan Diagram Venn

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
	PEMNAG	Tidak ada Sekretaris Nagari yang PNS Kurang maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena sarana 3. Dan prasaran kurang memadai 4. Kurangnya pengetahuan tentang Tupoksi pemerintah Nagari 5. Tidak memiliki alat transportasi operasional Kurang Kesejahteraan Perangkat Tidak ada jaminan kesehatan bagi perangkat nagari Mobiler kantor wali tidak memadai	PJS Sekretaris Ada Lahan ada dan Tenaga lokal Perangkat ada
2	BAMUS	Kurangnya pengetahuan tentang Tupoksi Kurang terselurnya aspirasi masyarakat Tidak tersedianya sarana kegiatan Administrasi/mobiler Kurangnya Kantor Bamus tidak ada	Perangkat ada
3	LPMN	Kurang mengerti akan Tupoksi dan lembaga tersebut kurang dikenal oleh masyarakat Kurang kesejahteraan anggota Belum ada kontribusi untuk pembangunan Nagari	Pengurus dan anggota ada
4	KPMN	Kurang mengerti akan Tupoksi lembaga tersebut kurang dikenal oleh masyarakat Kurang kesejahteraan anggota Belum ada kontribusi untuk pembangunan Nagari Kurang Kesejahteraan Kader KPMN	Kader ada,
5	PKK	Kurang tertatanya kelembagaan PKK Kurang minat ibu-ibu dalam Melaksanakan kegiatan PKK Kegiatan tidak aktif	Kader ada,PKK ada,Rt/Rw ada. PKK ada
6	POSYANDU	Kurang perhatian masyarakatan terhadap yandu Kesejahteraan Kader Yandu Kurang Fasilitas yandu Kurang	Kader ada.
7	PUSTU	1. PMT dari Posyandu belum ada	Bidan ada
		2. Masih banyak Bayi dan Ibu hamil yang kurang gizi	Bayi ada, ibu hamil ada
		3. Masih banyak para ibu hamil dan bayi yang kurang gizi	Ibu hamil dan anak ada
		4. kurangnya kesejahteraan Kader yandu	Kader ada
9	PPL	Belum meratanya pengetahuan para petani terhadap pengolahan lahan pertanian	Petani ada
		Kurang sosialisasi oleh PPL tentang pertanian dan peternakan	Petani ada
10	KARANG TARUNA	1. Kurangnya pengetahuan akan Tugas dan fungsi Karang Taruna 2. kelembagaan Karang taruna kurang memberi kontribusi yang positif	Lapangan ada ,Pemain ada

		terhadap pembangunan Nagari 3. Kurangnya minat pemuda-pemudi Untuk melaksanakan kegiatan Karang taruna 4. Bidang olah raga kurang berkembang 5. Lapangan Bola Rusak 6. Kreatifitas Anak Di Bidang Kesenian Tradisional Masih Kurang	
11	GAPOKTAN	Masih banyak petani belum mengetahui tentang Gapoktan	Petani ada
		Sekretariat gapoktan hanya ada palnknya saja	Petani ada
		Sulit mendapatkan bibit sapi yang bagus	Petani dan lahan ada
		Masih banyak kelompok tani yang belum mendapatkan bibit karet	Petani dan lahan ada
		Masih banyak petani yang menggarap lahan pertaniannya secara manual (tradisional)	Petani dan lahan ada

Hasil Revisi Pengkajian keadaan Kelembagaan Menggunakan Diagram Venn

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
	PEMNAG		
		Kurang maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena sarana prasarana kurang memadai	Perangkat ada staf kantor ada
		Kurangnya pengetahuan tentang Tupoksi pemerintah Nagari	Perangkat pemerintahan ada Swadaya ada
		Tidak memiliki alat transportasi Untuk Operasional	Perangkat pemerintahan ada Swadaya ada
		Kurangnya kesejahteraan Perangkat nagari	Perangkat dan staf ada
		Tidak ada jaminan kesehatan bagi perangkat nagari	Perangkat dan staf ada
		Mobiler kantor wali tidak memadai	Kantor wali masih di kontrak ada swadaya ada
		Kurangnya pengetahuan tentang Tupoksi	Perangkat adadan kelembagaan ada
2.	BAMUS	Kurang tersalurnya aspirasi masyarakat	Masyarakat ada kelembagaan pelaku Nagari ada
		Tidak tersedianya sarana kegiatan Administrasi dan kurangnya mobiler	Tenaga ada administrasi ada
		Kantor Bamus tidak ada	Lahan ada tenaga lokal ada
		Kurang mengerti akan Tupoksi dan	Bamus ada swadaya

		lembaga tersebut kurang dikenal oleh masyarakat	ada
3.	LPMN	Kurangnya kesejahteraan anggota	Pengurus ada anggota ada
		Belum ada kontribusi untuk pembangunan Nagari	Kelembagaan ada swadaya ada
		Kurang mengertiny masyarakat akan Tupoksi	Pengurus ada anggota ada
4.	KPMN	Kurangnya kesejahteraan anggota	Pengurus ada dan anggota ada
		Belum ada kontribusi untuk pembangunan Nagari	Pengurus ada dan anggota ada
		Kurangnya Kesejahteraan Kader KPMN	Pengurus adadan anggota ada
		Kurang tertatanya kelembagaan PKK	Pengurus ada anggota ada
		Kurangnya minat ibuk-ibuk dalamMelaksanakan kegiatan PKK	Pengurus ada anggota ada
5.	PKK	Kegiatan PKK tidak aktif	Pengurus ada anggota ada
		Kurangnya perhatian masyarakat terhadap YANDU	Kader ada swadaya ada
6.	POSYANDU	Kesejahteraan Kader Yandu Kurang	Kader ada swadaya ada
		Fasilitas yandu Kurang	Kader ada swadaya ada
7.	PUSTU	PMT dari Posyandu belum ada	Bidan ada
		Masih banyak Bayi dan Ibu hamil yang kurang gizi	Bayi ada, ibu hamil ada
		kurangnya kesejahteraan Kader yandu	Kader ada ada swadaya ada
		Peran serta dalam masyarakat kurang	Masyarakat tani ada Petugas ada
		Belum meratanya pengetahuan para petani terhadap pengolahan lahan pertanian	Petani ada lahan ada
		Kurangnya sosialisasi oleh PPL tentang pertanian dan perternakan	Petani ada
9.	PPL	Kurangnya pengetahuan akan Tugas dan fungsi Karang Taruna	Pemuda ada pengurus karang taruna ada
		kelembagaan Karang taruna kurang memberi kontribusi yang positif terhadap pembangunan Nagari	Pemuda ada pengurus karang taruna ada
		Bidang olah raga kurang berkembang	Pemuda dan organisasi ada swadaya ada
10.	KARANG TARUNA	Lapangan sepak Bola Rusak	Lapangan sepak bola/olah raga ada

			pemuda ada swadaya ada
		Kreatifitas Anak Di Bidang Kesenian Tradisional Masih Kurang	Pemuda ada swadaya ada
		Kreatifitas Anak Di Bidang Kesenian Tradisional Masih Kurang	Pemuda ada swadaya ada
		Kurangnya minat pemuda-pemudi Untuk melaksanakan kegiatan Karang taruna	Pemuda ada pengurus karang taruna ada
		Bidang olah raga kurang berkembang	Pemuda dan organisasi ada swadaya ada
		Kurangnya minat pemuda-pemudi Untuk melaksanakan kegiatan Karang taruna	Pemuda ada pengurus karang taruna ada
11.	GAPOKTAN	Masih banyak petani belum Mengetahui tentang Gapoktan	Petani ada
		Sekretariat gapoktan hanya ada pelaksana nya saja	Petani ada

Secara umum, Nagari Ampang Tulak Tapan mempunyai syarat-syarat yang memadai untuk bisa berkembang, baik dari pengembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun bidang kehidupan berNagari lainnya.

1. Sumber Daya Alam

Nagari Ampang Tulak Tapan dianugrahi dengan bentangan alam yang sangat lengkap, mulai dari bentuk permukaan bumi dengan dataran yang cukup luas yang cocok untuk lahan perkebunan / pertanian. Selain itu lahan perbukitan landai yang bisa dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, lahan tipe ini adalah yang terluas dibanding lahan lainnya, namun pemanfaatannya belum di optimalkan. Termasuk, dengan adanya tanah-tanah milik Nagari yang belum optimal pemanfaatannya serta adanya aset negara yang ada di Nagari pun bisa di manfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Nagari.

2. Sumber Daya Manusia

Sebagai sebuah nagari yang memiliki keragaman budaya, serta sudah semakin sadarnya masyarakat soal pentingnya pendidikan, maka beberapa tahun terakhir telah banyak anak Nagari yang mendapatkan ijazah dan gelar pendidikan yang memadai, namun keterbatasan ruang dan kesempatan membuat anak Nagari terdidik ini belum mampu berkontribusi maksimal

terhadap perkembangan nagari. Kedepan direncanakan untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam program pembangunan Nagari Ampang Tulak Tapan.

Data potensi Nagari Ampang Tulak Tapan di lihat dari berbagai sudut dapat di kelompokkan ,sebagai berikut :

1. Daftar Potensi dari Sketsa Nagari

Daftar potensi dari sketsa Nagari merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di Nagari yang bisa merubah keadaan menjadi lebih baik.

Tabel 13. Potensi menggunakan Sketsa Nagari

No	Potensi dari Sketsa Nagari Ampang Tulak Tapan
1	Batu
2	Pasir
3	Sungai dan Saluran Irigasi
4	Guru
5	Murid / Anak didik
6	PKK.
7	Kader-kader di Nagari.
8	Lahan tidur
9	Petani
10	Lapangan Olah Raga
11	Gedung Paud/TK
12	Lahan kosong

Daftar Potensi dari Kalender Musim;

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

Tabel 14. Potensi menggunakan Kalender Musim

No	Potensi dari Kalender Musim
1	Gotong royong
2	Sungai
3	Biaya dari swadaya
4	Selokan/parit
5	Sungai, Saluran Irigasi, dan sumur warga serta saluran air bersih.

2. Daftar Potensi dari Bagan Kelembagaan.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang terdapat pada masing-masing kelembagaan yang ada di Nagari Ampang Tulak Tapan.

Tabel 15. Potensi Menggunakan Bagan Kelembagaan

No	Potensi dari Bagan Kelembagaan
1	Lembaga Pemerintahan Nagari, Adat, BAMUS, TP-PKK, Kader Nagari dan LPMN
2	Pengurus lengkap
3	Tenaga potensial ada
4	Anak balita
5	Lahan kosong
6	Gotong royong
7	Bidan Nagari
8	Kebun
9	Sumber air
10	Siswa SD
11	Lembaga adat
12	Pengurus posyandu
13	Pengurus sanggar seni dan budaya
14	Pengurus LPM
15	Pengurus karang taruna dan Organisasi Pemuda
16	Pengurus Dasawisma
17	Pendidik/Siswa PAUD/TK/SPS/MDA

2.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari

A. Penyusunan RPJM

Penyusunan RPJM Nag di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Nagari Ampang Tulak Tapan dengan menggunakan dengan Alat pada :

1. Sketsa Nagari
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan (Diagram Venn)

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah kampung yang telah dilakukan pada :

No	Kampung	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Air Batu	Minggu, 29 Juli 2019	Kantor Wali Nagari
2	Simpang Hulu	Minggu, 29 Juli 2019	Kantor Wali Nagari

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat kampung, Kemudian dituangkan dalam Berita Acara

B. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakrarya ditingkat Nagari yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2019 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah masalah dari hasil musyawarah Nagari,
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Nagari
3. Menyusun Visi - Misi Nagari
4. Membuat skala prioritas
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak yang layak untuk memecahkan masalah yang ada.

C. Musrenbang Revisi RPJMNag

Berdasar hasil Penggalan Gagasan Kampung selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam musyawarah pembangunan Nagari yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal Agustus 2019 dan musrenbang Nagari akan dilaksanakan pada Selasa Agustus 2019

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen Revisi RPJM Nagari AMPANG TULAK TAPAN merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen Revisi RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Revisi RPJM-Nagari)

1. Tujuan penyusunan Revisi RPJM-Nagari adalah:

- a. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari
- c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan.

2. Prinsip Penyusunan RPJM-Nagari

- a. Lengkap artinya RPJM-Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari
- b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya
- c. Sistematis artinya RPJM-Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut
- d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan

- e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Nagari

3. Kaidah Penyusunan RPJM-Nagari

- a. RPJM-Nagari sebagai Proses Pemikiran Strategis
- b. RPJM - Nagari sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis

4. Tim Penyusun RPJM-Nagari

Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:

- a. Wali Nagari
- b. Sekretaris Nagari
- c. 1 (satu) orang Pengurus LPMN.
- d. 1 (satu) orang Kaur Pencanaan
- e. 2 (dua) orang Kepala Kampung
- f. 5 (lima) orang wakil masyarakat yang satu diantaranya adalah perempuan

5. Pembentukan Tim Penyusun

- a. Tim Penyusun RPJM Nagari dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
- b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Sosialisasi
Pemerintah Nagari berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:
 - a) Rencana penyusunan RPJM-Nagari
 - b) Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
 - c) Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - d) Jumlah, unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun
 - e) Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari.

6. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari

- a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari
- b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan:
 - 1) Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah :
 - a) Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari

- b) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
- c) Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.
- 2) Pelaksanaan/Proses rapat

Rapat dipimpin oleh Wali Nagari dan Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:

 - a) Pembukaan
 - b) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud. mencakup:
 - i. Penjelasan proses penyusunan RPJM-Nagari
 - ii. Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - iii. Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
 - iv. Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - v. Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
 - c) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari

Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil. maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
 - d) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari.

Anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

7. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun

- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Nagari
 - 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM- Nagari
 - 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
 - 5) Mengundang anggota Tim Penyusun

- 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun
- 7) Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
- 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi pengkajian keadaan Nagari
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
- 10) Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Nagari

b. Sekretaris Nagari

Karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat
- 2) Membantu Wali Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun
- 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Nagari

c. Pengurus LPMN, Kepala kampung dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun. bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghadiri rapat Tim Penyusun
- 2) Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Nagari

8. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM- Nagari dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Pendamping (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

9. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari oleh Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya Pernag tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari kepada Bamus.

10. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Nagari

a. Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah :

- 1) Memastikan kesiapan KPMN dan LPMN
- 2) Memastikan penugasan KPMN dan LPMN melakukan fasilitasi pengkajian keadaan nagari
- 3) Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari

- 4) Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDN dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan nagari
- 5) Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM- Nagari
- 6) Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari.

11. Pengkajian Keadaan Nagari

a. Pengertian

Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang:

- 1) Potensi nagari
- 2) Permasalahan yang dihadapi
- 3) Kebutuhan masyarakat

c. Pendamping

Kegiatan pengkajian keadaan nagari difasilitasi oleh KPMN dan LPMN

d. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Nagari).

e. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form-form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

f. Proses

- 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- 2) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
- 3) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajianTindakan Pemecahan Masalah

- 4) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan
- g. Waktu Pelaksanaan
Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nagari yang bersangkutan.
- h. Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Data Potensi Nagari
 - 2) Data Permasalahan
 - 3) Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan Sesuai matrik lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

12. Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari

- a. Rancangan RPJM-Nagari
Rancangan RPJM-Nagari dimaksud terdiri dari:
 - 1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari
 - 2) Rencana kegiatan pembangunan Nagari.
 - 3) Sistematika Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari disusun sesuai sistematika/tata susun sebagaimana Lampiran 1.

13. Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Nagari

- a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana pada Lampiran 2.
- b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan "urusan"
- c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
- d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia. mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana. (4) Lingkungan hidup. (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat.
- e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. mencakup: (1) Pertanian, (2) Peternakan ; (3) Perkebunan, (4) Pariwisata. dan (5) Kelautan/Perikanan, (6) Penanggulan keadaan darurat (bencana/KLB)
- f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus,terukur. dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

14. Rapat Penyusunan

- a Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun
 - b Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris
 - c Wali Nagari dan Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun
 - d Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis
 - e Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas
 - f Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun
 - g Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM-Nagari yang lengkap dan layak
 - h Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi
 - 1) Rapat Pleno
 - Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Nagari dan membahas hasil Rapat Komisi.
 - Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi
 - 2) Rapat Komisi
 - Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Nagari
 - Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.
 - Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi
 - Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris
 - Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
- 3) Waktu Penyusunan
- Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Nagari sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari.

4) Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM-Nagari

15. Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari

a. Forum Pembahasan

- 1) Rancangan (Awal) RPJM-Nagari dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Nagari.
- 2) Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Nagari yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. untuk membahas rancangan (Awal) RPJM-Nagari.

b. Peserta

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Nagari dimaksud adalah :

- 1) Tim Penyusun
- 2) Wakil kelompok-kelompok masyarakat. Ormas. dan LSM
- 3) Wakil kelompok perempuan
- 4) Wakil masyarakat miskin
- 5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari
- 6) Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu
- 7) Fasilitator
- 8) Proses pembahasan Rancangan RPJM-Nagari difasilitasi oleh tim

c. Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dan pengarahan oleh Camat
- 2) Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Nagari oleh Tim Penyusun
- 4) Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Nagari
- 5) Tanggapan balik Wali Nagari Tim Penyusun
- 6) Pembahasan oleh peserta
- 7) Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- 8) Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
- 9) Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi. yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
- 10) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- 11) Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang

12) Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari.

d. Penutupan oleh Wali Nagari

e. Hasil

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari.

16. Penetapan Rancangan RPJM-Nagari

a. Forum Penetapan

1) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dalam Forum Rapat BAMUS. Yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BAMUS

2) Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BAMUS.

b. Peserta Rapat

Peserta Rapat BAMUS untuk penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari adalah :

1) Semua Anggota BAMUS

2) Wali Nagari

3) Sekretaris Nagari

4) Semua Kasi, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Nagari

5) Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Nagari

6) Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.

7) Pengurus Ormas dan/atau LSM

8) Unsur masyarakat lainnya

c. Sifat Rapat

1) Rapat BAMUS untuk penetapan Pernag tentang RPJM-Nagari bersifat terbuka untuk umum

2) Penetapan/Pengesahan

3) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Nagari (Pernag)

17. Pengajuan Rancangan Pernag

Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari kepada BAMUS. paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Nagari

a. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BAMUS

1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Pernag dimaksud diterima. BAMUS menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari

- 2) Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari diterima.

b. Proses Rapat Penetapan

- 1) Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
- 2) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari
- 3) Tanggapan Anggota BAMUS
- 4) Jawaban Wali Nagari (Tim Penyusun)
- 5) Pengambilan Keputusan/Penetapan Pernag tentang RPJM- Nagari
- 6) Penandatanganan naskah Pernag oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS.
- 7) Hasil
- 8) Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari

18. Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Nagari dipenuhi dari sumber dana:

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBD Propinsi
- c. APBN
- d. APB Nagari
- e. Sumber lain yang tidak mengikat
- f. Swadaya Masyarakat

3.2.1 Penentuan Peringkat Masalah

Dalam melaksanakan Penentuan Peringkat Masalah tim penyusun RPJM menyepakati skor nilai sebagai berikut :

- Nilai Tinggi 7 – 10
- Nilai Sedang 4 – 7
- Nilai Rendah 1 – 4

Adapun hasil Penentuan Peringkat Masalah dari Pengkajian Keadaan Nagari dengan menggunakan metode Sketsa Nagari, Diagram Venn dan Kalender Musim dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Daftar Peringkat Masalah Nagari Ampang Tulak Tapan

No	Masalah	Disarankan Oleh Orang Banyak	Sangat Parah	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	Belum terpenuhinya akses transportasi hasil pertanian masyarakat	10	8	8	9	10	45	2
2	Belum memiliki gedung fisik kantor dan social	6	5	4	7	10	32	58
3	Belum memiliki Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	9	7	6	8	8	38	16
4	Belum ada perpustakaan umum untuk masyarakat	6	5	4	6	7	28	74
5	Masih banyak sarana prasarana nagari dan masyarakat kurang layak dan rusak	10	8	8	9	8	43	10
6	Sulitnya mendapatkan air bersih bagi masyarakat	8	6	5	8	9	36	37

7	Kurangnya listrik subsidi untuk masyarakat	7	6	9	8	5	35	45
8	Berkurangnya lahan pertanian	10	8	7	6	9	40	15
9	Makin luasnya aliran sungai akibat dorongan air yang kuat	6	8	8	6	4	32	59
10	Masih banyak saluran yang tidak layak sehingga sering terjadi luapan air karena hujan	4	6	6	8	6	30	69
11	Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang	6	8	6	9	6	35	43
12	Belum memiliki ambulance nagari	8	6	7	8	9	38	19
13	Belum memiliki kendaraan dinas badan nagari	9	6	8	6	9	38	17
14	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang	10	8	8	9	10	45	3
15	Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan masih kurang	8	8	6	9	6	37	33
16	Susahnya akses internet dan akses informasi oleh masyarakat	7	6	6	5	8	32	60
17	Masih banyak masyarakat belum memiliki jamban sendiri	8	7	6	9	8	38	18
18	Masih adanya masyarakat yang penyandang disabilitas	6	7	6	8	9	36	40

19	Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi	9	10	8	6	9	42	12
20	Kurang layak saluran irigasi perswasahan masyarakat	7	6	7	8	6	34	52
21	Belum terselurnya kreasi seni oleh generasi muda masyarakat	10	9	10	8	9	46	1
22	Masih adanya lahan tidur di wilayah kenagarian	10	9	10	7	9	45	4
23	Masih banyak ternak masyarakat yang berkelian siang dan malam hari	8	7	6	9	8	38	29
24	Masih kurangnya peralatan pengolahan lahan pertanian	9	8	8	9	10	44	6
25	Belum memiliki gedung Posyantek nagari	10	8	9	8	9	44	5
26	Belum memiliki pasar nagari	8	6	9	6	9	38	32
27	Belum adanya pemakaman umum nagari	9	8	8	10	8	43	9
28	Belum memiliki aset yang dapat menambah PAN	8	6	8	9	7	38	20
29	Kurangnya keindahan nagari batang arah tapan	8	9	6	8	6	37	34
30	Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang	10	8	7	9	8	42	13
31	Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan	8	7	6	9	8	38	21

32	Berkurangnya lahan pertanian	8	6	7	5	9	35	44
33	Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi	10	9	8	8	9	44	8
34	Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga	6	8	6	5	4	29	71
35	Masih kurangnya kapasitas aparatur pemerintahan nagari	4	3	1	5	4	17	89
36	Masih kurangnya kapasitas lembaga, kelompok masyarakat dan nagari	7	8	6	5	8	34	51
37	Masih kurangnya pembinaan kelompok dan lembaga masyarakat	7	6	5	5	7	30	70
38	Tidak semua masyarakat mendapatkan informasi kegiatan nagari	5	6	4	6	6	27	75
39	Kurangnya lembaga, kelompok dan aparatur pemerintahan nagari mendapat perlindungan hukum	6	8	4	5	8	31	65
40	Masih banyak masyarakat miskin belum mendapatkan listrik subsidi	8	8	9	10	8	45	11
41	Masih kurangnya kesejahteraan lembaga, kelompok masyarakat	6	4	2	8	4	21	88
42	Lemahnya masyarakat dlm melestarikan seni budaya tradisional di kampung	7	6	7	8	8	33	87
43	Belum adanya Sarana dan Prasarana Kantor Wali	10	8	9	8	9	44	-
44	Belum adanya Balai Pertemuan Masyarakat di kampung Air batu	8	6	7	8	9	38	22
45	Belum adanya insentif bagi perangkat lembaga pemberdayaan yang ada	8	6	7	6	8	27	62

46	Buruknya Gedung Pemerintahan Nagari dan Lembaga Nagari di kampung	8	7	6	8	9	38	30
47	Kurangnya Beberapa lembaga bersosialisasi dengan masyarakat di Kampung	4	3	6	5	4	22	84
48	Sulitnya mendapatkan Modal untuk membuka Usaha	6	5	8	6	7	32	61
49	Kurang berkembangnya KOPERASI yang ada di kampung	6	4	2	4	3	19	87
50	Minimnya Modal di kampung	4	6	5	3	7	25	80
51	Sulitnya para Petani membeli dan mendapatkan bibit-bibit Pertanian yg unggul	8	9	7	8	9	41	14
52	Belum terkelolanya Tambang Batu/Koral yang ada, dengan baik di Kampung simp.hulu	4	3	4	2	2	15	90
53	Kurangnya pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi masing- masing	8	9	6	9	6	38	23
54	Lemahnya tanggung jawab terhadap kegiatan pelestarian lingkungan	8	9	6	8	7	38	28
55	Belum adanya sekretaris dan staf umum Nagari	8	6	5	6	5	30	68
56	Pelaksanaan Tupoksi masing-masing perangkat Nagari masih kurang baik	6	5	4	6	5	26	79
58	Kurangnya Fasilitas terhadap Koperasi dan usaha masyarakat yang ada	8	5	6	7	7	33	56
59	Kurangnya SDM	7	6	4	5	4	26	78
60	Kurangnya kemampuan fasilitasi kepada masyarakat	8	9	7	8	6	38	27

61	Belum adanya sarana dan prasarana LPMN	6	4	5	3	5	23	1	82
64	Kurangnya kemampuan fasilitasi kepada masyarakat	8	6	7	7	8	36		42
65	Tidak adanya tunjangan kesehatan bagi KPMN	6	4	4	5	4	23		83
66	Belum adanya insentif/ tunjangan sosial bagi Kader	6	7	5	7	6	31		64
67	Masih Kurangnya Pelaksanaan Tupoksi beberapa Kader.	6	6	5	6	5	28		73
69	Kurangnya pembinaan dari instansi yang terkait	6	6	6	5	6	29		72
70	Kurangnya perhatian PKK terhadap pentingnya Apotik Hidup	6	5	6	4	3	24		81
71	Belum adanya sarana dan prasarana kegiatan PKK yang memadai	8	7	5	6	5	31		65
72	Masih Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan hidup	8	7	6	7	5	33		55
73	Menurunnya solidaritas ibu PKK	8	6	7	6	7	34		50
74	Kurangnya kepedulian terhadap kesenian dan budaya tradisional	6	4	3	2	3	18		88
75	Belum adanya pembinaan terhadap kelompok SPP BLM/Perguliran oleh PKK Nagari	6	6	4	6	4	26		77
76	Kurang terjaganya Kebersihan sekolah karena Jalan tergenang air	8	6	7	7	6	34		49
77	Gedung PAUD di Kampung Sering Kebobolan	8	8	6	7	7	36		38
78	Sulitnya anak didik TPA/TPSA menjaga kebersihan,	6	5	4	5	6	26		76
79	Banyaknya Penyakit yang menyerang	8	8	6	7	5	34		48

80	Menimbulkan Banjir yang dapat menjadi sumber penyakit kulit	8	6	7	5	7	33	54
81	Kurang terpenuhinya kebutuhan Air bersih	8	6	7	5	4	30	66
82	Rusaknya jalan Kampung diberapa titik, dengan keadaan berlubang yang digenangi air	8	8	9	7	6	38	31
83	Sering terjadinya banjir di Area Jl.suka damai	8	7	5	6	7	33	53
84	Jalan-jalan penghubung semakin rusak	8	7	8	6	8	37	35
86	Kekurangan air bersih	8	8	7	8	6	37	36
87	Belum tersedianya peralatan Pesta	4	4	3	2	1	14	91
88	Sulitnya jalan Kampung untuk dilalui dalam mengeluarkan hasil panen, dll, akibat belum adanya pengerasan jalan	8	6	7	8	9	38	24
89	Kumuhnya lingkungan hidup	8	8	7	8	7	38	25
90	Tidak dapat mengadakan kegiatan seni	8	7	8	6	7	36	41
92	Menurunnya Pendapatan masyarakat	7	7	7	6	7	34	46
93	Susahnya petani mengeluarkan hasil panen, akibat jalan rusak dan licin	8	7	6	8	5	34	47
95	Menurunnya Hasil panen	7	6	4	6	7	30	67
96	Menurunnya hasil panen, akibat kekurangan kebutuhan air	8	7	6	7	8	36	39
97	Pertumbuhan/produktifitas kelapa sawit kurang baik, akibat lahan tergenang air	8	8	6	8	8	38	26
98	Menyulitkan pekerja untuk memasuki area tambang	4	6	3	2	4	19	86

Tabel 16. Daftar Pengkajian Tindakan Masalah Nagari Ampang Tulak Tapan

MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
Belum terpenuhinya akses transportasi hasil pertanian masyarakat	Kurangnya jalan usaha tani	Swadaya masyarakat, gotong royong	Pembangunan Jalan dan Jembatan Nagari	Pembangunan Jalan dan Jembatan Nagari
Belum memiliki gedung fisik kantor dan sosial	Belum punya gedung	Swadaya masyarakat, Gotong royong	Pembangunan Gedung sendiri	Pembangunan Gedung sendiri
Belum memiliki Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Belum memiliki sarana prasarana	Swadaya masyarakat, Gotong royong	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
Belum ada perpustakaan umum untuk masyarakat	Tiada Buku Minat baca rendah	Anak usia Sekolah	Pendirian taman bacaan masyarakat dan Pustaka nagari	Pendirian taman bacaan masyarakat dan Pustaka nagari
Masih banyak sarana prasarana nagari dan masyarakat kurang layak dan rusak	Kurangnya biaya dalam pemeliharaan Sarpras	Swadaya masyarakat, Gotong royong	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur dan masyarakat	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur dan masyarakat

Sulitnya mendapatkan air bersih bagi masyarakat	Belum adanya sumber air bersih	Swadaya masyarakat, Gotong royong	Pembangunan sarana air bersih	Pembangunan sarana air bersih
Kurangnya listrik subsidi untuk masyarakat	Mahalnya harga listrik	Swadaya masyarakat, Gotong royong	Pembangunan sarana listrik mikrohidro dan Biogas	Pembangunan sarana listrik mikrohidro dan Biogas
Berkurangnya lahan pertanian	Pembukaan lahan untuk perumahan	Tenaga Tani	Intensifikasi Pertanian	Pelatihan Intensifikasi Pertanian
Makin luasnya aliran sungai akibat dorongan air yang kuat	Kurangnya biaya	Ketersediaan anggaran	Normalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong dan Pengaman Tebing	Normalisasi Sungai dan Pembangunan Bronjong dan Pengaman Tebing
Masih banyak saluran yang tidak layak sehingga sering terjadi luapan air karena hujan	Masih banyak sampah yang tertambat dalam saluran	Swadaya masyarakat, Gotong royong	Pembangunan Saluran Air, Drainase dan Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Air, Drainase dan Gorong-gorong
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang	Tidak ada sarpras kesehatan	Bidan nagari	Pendirian Sarana dan Prsarana Kesehatan	Pendirian Sarana dan Prsarana Kesehatan
Belum memiliki ambulance nagari	Kurangnya biaya	Bidan Nagari	Pengadaan mobil ambulance nagari	Pengadaan mobil ambulance nagari
Belum memiliki kendaraan dinas bidan nagari	Kurangnya biaya	Bidan Nagari	Pengadaan kendaraan dinas bidan nagari	Pengadaan kendaraan dinas bidan nagari
Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang	Tidak ada sarpras pendidikan	Guru PAUD,	Pendirian Sarana dan Prsarana Pendidikan	Pendirian Sarana dan Prsarana Pendidikan
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan masih kurang	Tidak ada sarpras kesehatan	Swadaya masyarakat, Gotong royong	Pendirian Sarana dan Prsarana kebersihan	Pendirian Sarana dan Prsarana kebersihan

Belum punya akses internet dan akses informasi oleh masyarakat	Belum punya jaringan internet umum	Guru dan Siswa Sekolah	Pengadaan jaringan Internet umum dan pengadaan Informasi Nagari	Pengadaan jaringan Internet umum dan pengadaan Informasi Nagari
Masih banyak masyarakat belum memiliki jamban sendiri	Kurangnya biaya	Swadaya masyarakat, Gotong royong	Pembangunan MCK dan Jambanisasi	Pembangunan MCK dan Jambanisasi
Masih adanya masyarakat yang penyandang disabilitas	Kurangnya biaya	Penyandang disabilitas	Pengadaan panti rehabilitas dan alat bantu bagi penyandang disabilitas	Pengadaan panti rehabilitas dan alat bantu bagi penyandang disabilitas
Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi	Belum punya pustaka	Masyarakat	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Hukum	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya Hukum di Kp.
Kurang layak saluran irigasi perswasahan masyarakat	Kurangnya biaya	Lahan ada Masyarakat	Pemberian Alat-alat pertanian yang lebih baik	Pemberian Alat-alat pertanian yang lebih baik di Kp.
Belum tersalurnya kreasi seni oleh generasi muda masyarakat	Belum punya sanggar	Anak Didik Masyarakat Mesjid/Mushola	Memberikan tunjangan kepada Tendik	Memberikan tunjangan kepada Tendik
Masih adanya lahan tidur di wilayah kenagarian	Kurangnya biaya	Lahan Tidur	Percetakan lahan pertanian/Persawahan	Percetakan lahan pertanian/Persawahan
Masih banyak ternak masyarakat yang berkeliraran siang dan malam hari	Kurang Sosialisasi	Ternak kaki empat	Pengadaan kandang dan lahan ternak	Pengadaan kandang dan lahan ternak
Masih kurangnya peralatan pengolahan lahan pertanian	Kurang biaya	Lahan pertanian	Pengadaan alsintan pertanian dan lahan pengeringan lahan pertanian	Pengadaan alsintan pertanian dan lahan pengeringan lahan pertanian
Belum memiliki gedung Posyantek nagari	Kurang Sosialisasi	Swadaya masyarakat	Pengadaan pembangunan dan sarana prasarana Teknologi tempat guna	Pengadaan pembangunan dan sarana prasarana Teknologi tempat guna

Belum memiliki pasar nagari	Kurang Biaya	Swadaya Masyarakat	Pengadaan pasar nagari	Pengadaan Pasar nagari
Belum adanya pemakaman umum nagari	Minimnya anggaran di Nagari	Swadaya masyarakat	Pengadaan lahan pemakaman masyarakat nagari	Pengadaan lahan pemakaman masyarakat nagari
Belum memiliki aset yang dapat menambah PAN	Kurang biaya	- Lahan ada - Material Lokal	Membangun Penginapan	Membangun Penginapan
Kurangnya keindahan nagari ampang tulak tapan	Kurangnya biaya	Swadaya Masyarakat	Pengadaan pagar seragam dan pagar sawah masyarakat	Pengadaan pagar seragam dan pagar sawah masyarakat
Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang	Kurangnya sosialisasi	Ketersediaan tenaga	Pendidikan dan latihan semi formal dan informal	Pendidikan dan latihan semi formal dan informal
Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan	Ketersediaan Tenaga pelatih/Fasilitator	Masyarakat	Mendatangkan tenaga pelatih profesional	Mendatangkan tenaga pelatih profesional
Berkurangnya lahan pertanian	Pembukaan lahan untuk perumahan	Tenaga tani	Intensifikasi Pertanian	Pelatihan Intensifikasi pertanian
Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi	Tenaga Kurang	Masyarakat	Pelatihan tenaga teknik bangunan	Pelatihan tenaga teknik bangunan
Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga	Lahan sempit	Masyarakat	Pelatihan Posyantek Nagari	Pelatihan Posyantek Nagari
Masih kurangnya kapasitas aparat pemerintah nagari	Tenaga Profesional kurang	Wali dan perangkat	Pelatihan WN, Bamus dan Perangkat dan Study Banding	Pelatihan WN, Bamus dan Perangkat dan Study Banding
Masih kurangnya kapasitas lembaga, kelompok masyarakat dan nagari	Kurangnya SDM yang ahli dalam bidang pertambangan	Lembaga dan kelompok masyarakat dan	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas lembaga, kelompok masyarakat dan nagari serta	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas lembaga, kelompok masyarakat dan nagari serta

		nagari	masyarakat dan nagari serta Study banding	Study banding
Masih kurangnya pembinaan kelompok dan lembaga masyarakat	Kurangnya biaya	Lembaga dan kelompok masyarakat dan nagari	Pembinaan lembaga, kelompok masyarakat dan nagari	Pembinaan lembaga, kelompok masyarakat dan nagari
Tidak semua masyarakat mendapatkan informasi kegiatan nagari	Kurang Sosialisasi	-masyarakat	Musyawarah nagari tentang serah terima tanggung jawaban	Musyawarah nagari tentang serah terima tanggung jawaban
Kurangnya lembaga, kelompok dan aparat pemerintahan nagari mendapat perlindungan hukum	Kurang Sosialisasi	Lembaga, kelompok dan aparat pemerintahan nagari	Bantuan hukum bagi Lembaga, kelompok dan aparat pemerintahan nagari	Bantuan hukum bagi Lembaga, kelompok dan aparat pemerintahan nagari
Masih banyak masyarakat miskin belum mendapatkan listrik subsidi	Belum punya jaringan internet umum	Guru dan siswa sekolah	Pengadaan jaringan umum	Pengadaan jaringan umum
Belum adanya sarana dan prasarana PAUD/ TK	Masih minimnya pendapatan masyarakat	Lahan ada, Material lokal Tendik, Swadaya	Pembangunan gedung PAUD/TK	Pembangunan gedung PAUD/TK
Belum adanya Sarana Prasarana TPA/TPSA	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelajaran Agama	Lahan ada, Material lokal Tenaga pengajar Swadaya	Pembangunan gedung TPA/TPSA	Pembangunan gedung TPA/TPSA
Masih kurangnya Kemampuan masyarakat untuk membiayai anak untuk bersekolah	Masih minimnya pendapatan masyarakat	Sekolah SD/SMP Siswa/i RTM	Memberikan Bantuan beasiswa untuk melanjutkan sekolah	Memberikan Bantuan beasiswa untuk melanjutkan sekolah
Minimnya honor Tendik TPA	Belum adanya tunjangan bagi	Tendik Lahan ada	Memberikan tunjangan kepada	Memberikan tunjangan kepada tendik

Belum adanya sarana dan prasarana Kesehatan	Tendik Belum adanya bantuan dari pemerintah Pusat	Material Lokal Kader Posyandu, Lahan ada, Swadaya	tendik Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan
Masih rendahnya nilai Gizi Balita	Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan dan membeli makanan Balita yang SEHAT.	Balita Kader Yandu	- Melakukan pemberian bantuan makanan tambahan untuk Balita	- Pemberian bantuan PMT Balita
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB	Kurangnya Sosialisasi pemerintah kepada masyarakat	Masyarakat Kader Kesehatan	- Melakukan Penyuluhan tentang pentingnya KB	- Melakukan Penyuluhan tentang pentingnya KB
Masih adanya masyarakat Sulitnya untuk memenuhi makanan yg sehat	Masih kurangnya hasil pendapatan masyarakat untuk membeli makanan yang bergizi cukup	Masyarakat	Melakukan pemberian bantuan Sembako	Melakukan pemberian bantuan Sembako
Belum adanya pemberian JAMPERSAL bagimasyarakat	Kurangnya Perhatian Dinas kesehatan daerah terhadap masyarakat	Masyarakat RTM	Memberikan Kartu JAMKESMAS	Memberikan Kartu JAMKESMAS
Belum adanya JAMKESDA/ JAMKESMAS bagi RTM	Kurangnya Perhatian Dinas kesehatan daerah terhadap masyarakat	RTM	Memberikan Kartu JAMKESMAS	Memberikan Kartu JAMKESMAS
Belum lancarnya akses jalan	Belum mempunyai masyarakat untuk membangun jalan yang layak	Swadaya, Tenaga gotong royong Material Lokal	- Memberikan bantuan untuk pembangunan jalan yang layak	- Memberikan bantuan untuk pembangunan jalan yang layak

Sulitnya masyarakat mengeluarkan hasil panen	Buruknya akses jalan yang ada	Kelapa sawit, Badan jalan Material Lokal Tenaga gotong royong	Melakukan perbaikan akses jalan	Melakukan perbaikan akses jalan dan penguatan jalan
--	-------------------------------	---	---------------------------------	---

Scanned by Easy Scanner

BAH IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1 Visi Nagari

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan Nagari yang ingin dicapai dalam 6 (enam) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan Nagari dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan misi Nagari.

Dengan mempertimbangkan Arah Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan Pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari 2017 - 2022 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah 6 (enam) tahun sebagai berikut:

***“ TERWUJUDNYA NAGARI AMPANG TULAK YANG MAPAN DALAM
PEMERINTAHAN, ULET DALAM BEREKONOMI, DAN MASYARAKATNYA
SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN ”***

Dari visi diatas, sejumlah hal bisa dilakukan tanpa meruntuhkan sendi-sendi agama dan adat dalam nanungan filosofi Adat Basandi Syarak' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

4.2 Misi Nagari

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJM Nagari Ampang Tulak Tapan tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemerintah Nagari Yang Mapan dan Ulet
2. Memajukan adat,tradisi serta Budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-syarak Basandi Kibabullah (ABS-SBK)
3. Mengoptimalisasi Pembangunan sarana dan prasarana Ekonomi dan Sosial dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan mencapai klualitas hidup yang Lebih baik

4.3 Tujuan Dan Sasaran

4.3.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritastertinggi

dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.3.2 Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Nagari Simpang Gunung Tapan perlu menetapkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 4.3.2.1 Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Melaksanakan Pemerintah Nagari Yang mapan dan Ulet	1. Mewujudkan tata kelola pemerintah nagari yang baik 2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat nagari	1. Terselenggaranya pemerintah Nagari yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel. 2. Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) dan standar Operasional Prosedur di pemerintah Nagari	1. Pengoptimalisasikan sistem penyelenggaraan pemerintah nagari melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana. 2. Penetapan tata kelola pemerintah Nagari, baik administrasi secara keseluruhan maupun pelayanan umum, serta menertibkan administrasi kependudukan secara optimal	Mengoptimalkan sistem penyelenggaraan pemerintah nagari melalui keterampilan, pelatihan dan pembinaan serta melengkapi sarana. 2. Penetapan tata kelola pemerintah Nagari, baik administrasi secara keseluruhan maupun secara umum
	2. Memajukan Adat, Tradisi serta Budaya Masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi	1. Menumbuhkan Masyarakat Nagari yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan	1. Terbentuknya masyarakat nagari yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah	1. Peningkatan mutu SDM masyarakat Nagari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat, budaya dan agama sebagai identitas kembali keseluruhan	Meningkatkan mutu kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung

Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	dan teknologi serta beradat dan akidah yang kuat 2.Menciptakan kehidupan Masyarakat nagari yang berbudaya ,beriman dan bertaqwa.	1.Terciptanya masyarakat nagari yang Maju dan berbudaya serta mempunyai nilai akhlak terpuji	2.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 1.Peningkatan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat istiadat ,budayadan agama	pembelajaran yang memadai 2.Fasilitas pengembangan sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal. 3.optimalisasi fungsi mesjid surau dan susala. 1.Mendalami pemahaman dan pengalaman ajaran agama dan adat istiadat
3.Mengoptim alisasi Pembanguna n Sarana dan Prasarana Nagari dalam Menunjang Mutu Kesejahteraa masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak	1.Pengembanga n produktifitas sektor-sektor rill ekonomi nagari 2.meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana dan infrastuktur Nagari	1. Berkembangnya produktifitas sektor-sektor rill ekonomi nagari dalam meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat nagari 2.meningkatkan Kapasitas Sarana Prasana berpotensi ekonomis dan insfatruktur nagari dalam menunjang aktivitas masyarakat nagari	1. Peningkatan SDM masyarakt Nagari dalam berwiraswasta, bertani,bertern ak dan sektor lainnya yang bersifat ekonomis 2.Pembanguna n sarana prasarana berpotensi ekonomis dan intrstruktur nagari dalam menunjang aktifitas masyarak nagari	1.Meningkatk an pengelolaan dan manajemen baik kelompok maupun perorangan 2.Menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat nagari

SINKRONISASI VIVI MISI DENGAN KABUPATEN

NO	MISI KABUPATEN PESISIR SELATAN	MISI WALI NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
	Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan Responsive dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat	Membangun pemerintah Nagari yang mapan dan ulet
	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian dan Infrastruktur Sosial yang terkait dengan Sektor Unggulan Daerah	Mengoptimisasikan pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak
	Meningkatkan Kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan mengembangkan nilai nilai budaya ABS-SBK	Melestarikan dan memajukan Adat,Tradisi serta Budaya masyarakat nagari dalam upaya implementasi Adat basandi syarak-syarak basandi Kita Bullah

10 Program Unggulan Kabupaten

1. RTLH
2. Jambanisasi
3. Air bersih
4. Kabupaten / Nagari Sehat
5. Pasar Kaget
6. Irigasi
7. Nagari Layak Anak
8. Pustaka Nagari
9. Olah Raga
10. Puskessos

a. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 6 (enam) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Nagari mencapai tujuan dan sasaran RPJM Nagari dengan efektif dan efisien.

Untuk merumuskan arah kebijakan Nagari, secara umum mesti dilihat prioritas yang di rumuskan dalam program strategis:

1. Meningkatkan kemampuan **Aparatur** dalam pelayanan bidang pemerintahan, mewujudkan pemerintahan Nagari yang bersih melalui transparansi dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan informasi program masuk desa dan penggunaan ADD, akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan dana-dana pembangunan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pendapatan Nagari.
2. Menyiapkan **Sumber Daya Manusia anak nagari** yang siap kerja sehingga lebih produktif melalui pelatihan-pelatihan keterampilan. Baik pelatihan formal maupun non formal, hal ini membutuhkan kerja sama dari berberapa pihak, Balai Latihan Kerja Di kabupaten maupun Propinsi dan lembaga pelatihan swasta serta pelatihan-pelatihan lokal dengan instruktur-instruktur lokal yang menguasai ketarampilan asli nagari sitiung seperti: pelatihan anyaman, tukang perahu, ahli memasak, petani-petani sukses dan keterampilan lain.
3. Pertanian dan perkebunan yang selama ini menopang perekonomian masyarakat harus lebih diperhatikan dengan mengupayakan pembangunan infrastruktur tambahan dan mengusahakan tersedianya pupuk subsidi dan non subsidi serta jaminan harga pasca panen. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi BUM-Nag, tentunya hal ini akan melibatkan berbagai pihak: perusahaan pupuk dan pemerintahan daerah, kami akan mengkomunikasikan agar hal tersebut bisa kita wujudkan.
4. Menggalakkan kembali budayagotong royong, kita akan menjadwalkan bulan bersih dan penilaian kebersihan Kampung di tiap tahunnya, diharapkan dengan adanya kompetisi antar Kampung, nagari kita akan menjadi bersih, drainasenya tertata, jalan-jalannya bersih dan terang, lingkungannya asri. Dengan demikian akan terwujud lingkungan yang aman, tentram, damai dan sehat.
5. Membatasi, bahkan melarang (*moratorium*) penggunaan lahan-lahan pertanian untuk bangunan dan atau penjualan lahan kepada pihak luar. Sebagai bentuk kebijakan untuk mengantisipasi kelaparan dan merosotnya kondisi perekonomian. Serta pemerintahan nagari perlu menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan nagari yang dikelola dengan baik, sehingga sewaktu-waktu bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan dalam rencana kami, akan mengupayakan tambahan lahan perkebunan milik nagari dan mengusahakan lahan untuk organisasi pemuda dan anak yatim.
6. Mengagendakan malam budaya pada setiap bulannya, memberikan wadah bagi seni budaya anak nagari pada malam-malam yang dijadwalkan, bergiliran, sehingga anak nagari dan kelompok-kelompok seni akan diminta tampil. Serta pada akhirnya, dibulan tertentu (desember atau agustus) kita akan adakan Festifal Budaya Sitiung. Harapannya, dengan event budaya yang terjadwal akan bisa menarik orang untuk datang dan membelanjakan uangnya di nagari kita. Serta kita akan menggali kembali budaya lama yang hampir terlupakan atau budaya lama nagari yang bersifat lokal kita usahakan untuk diperkenalkan di tingkat yang lebih tinggi, budaya Berzanji misalnya.

7. Menjadikan masjid-masjid sebagai sarana bagi para pemeluk agama lainnya untuk program pengajian bulanan yang mempromosikan masjid yang terdapat di desa-desa masjid di tiap-jorong sehingga sangat penting.
8. Mengenai pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur di Kecamatan-Kampung kami akan mengutamakan prioritas pembangunan pembangunan tersebut. Kampung masing-masing. Menyediakan pembangunan/pertanian serta akan akan tidak akan membagi-bagi menjadi beberapa-seperangkat akan akan akan mengupayakan program "satu kampung satu rumah" sehingga akan akan akan masuk benar-benar terasa manfaatnya.
9. Berperan serta aktif dalam wadah Forum Walinagari Kecamatan Kecamatan. Maupun Propinsi untuk membangun jalinan dengan tingkat-tingkat dan diharapkan bisa berbagi informasi maupun ketertarikan untuk ketertarikan masjid.
10. Agar pelaksanaan program tidak sampai saat ini dan akan akan akan masyarakat nagari, perlu ditingkatkan efektivitas MUSREMBANGI dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Dan ini musrenbang akan ditempelkan di tempat-tempat umum, termasuk diantar dan waktu pelaksanaan program, sehingga masyarakat merasakan ikut dilibatkan.
11. Selama ini Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari dianggap dokumen rahasia. Padahal APB-Nagari adalah dokumen publik. Untuk itu akan akan melakukan transparansi APB-Nagari lewat Media Online, papan-papan informasi dan tempat-tempat umum.
12. Serta kami akan mengupayakan dan memanfaatkan website resmi nagari Simbang Gunung Tapan, sehingga apapun kegiatan program, berita penting maupun pengumuman dari kantor walimanager tersampaikan, terutama bagi kaum muda yang jarang melihat papan informasi karena kecenderungan menggunakan internet. Karena nagari ini membutuhkan kaum muda yang selama ini kurang aktif walidat dan ruang.

Agar pembangunan lebih terarah, perlu dirumuskan tahapan perencanaan sebagai penjabaran atas visi dan misi Nagari menjadi tujuan, sasaran, strategi untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan yang menjadi petunjuk teknis mengenai apa yang akan dilakukan. Sehingga nantinya diharapkan pada saat penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari lebih terarah.

Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sector penting adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganeekaragaman komoditas, fasilitasi pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

2. Sub Bidang Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

3. Sub Bidang Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil). Peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

4. Sub Bidang Perekonomian Nagari

Arah kebijakan umum perekonomian nagari adalah peningkatan lapangan kerja, penganeekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi nagari yang berkelanjutan.

Prioritas Kegiatan

5. Sub Bidang Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat nagari.

PrioritasKegiatan

6. Bidang Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan nagari adalah penataan kelembagaan pemerintah nagari, peningkatan kinerja aparatur pemeintah nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan nagari, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan msyarakat.

7. Sub Bidang Sosial Budaya

Arah kebijakan umum di bidang social budaya adalah :

- a. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif.
- b. Terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib dan disiplin, beretoskerja tinggi, agamis dan bermoral.
- c. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan nagari.
- d. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial.
- e. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program. Maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari Nagari.

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja Pemerintahan desa (RKP-Des) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Wali Nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM Nagari tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Wali Nagari silih berganti.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap Kondisi Nagari, Potensi dan Masalah. Serta daftar RPJM Nag 2017 - 2022, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat banyak masalah dan potensi untuk mencapai Visi dan Misi Nagari.
2. Dibutuhkan perhatian lebih dalam Peningkatan, Pengembangan dan Pemanfaatan Pembangunan Nagari.
3. Diperlukan komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pembangunan Nagari.
4. Keberhasilan Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin kelangsungan Pembangunan Nagari.
5. Keberhasilan Pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana Komitmen dan Konsisten Pemerintahan dan Masyarakat Nagari saling bekerja sama membangun Nagari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang perlu disimpulkan sebagai

berikut :

1. Dalam pelaksanaan dan implementasi RPJMNag ini, diharapkan adanya review, evaluasi dan pengawasan yang mendalam untuk menjaga konsistensi Pembangunan Nagari.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) merupakan satu-satunya Dokumen Perencanaan yang diakui di Nagari, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan selama priode 2017 s/d 2022. Yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag).

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Page Number: 100

Page Number: 100

Page Number: 100

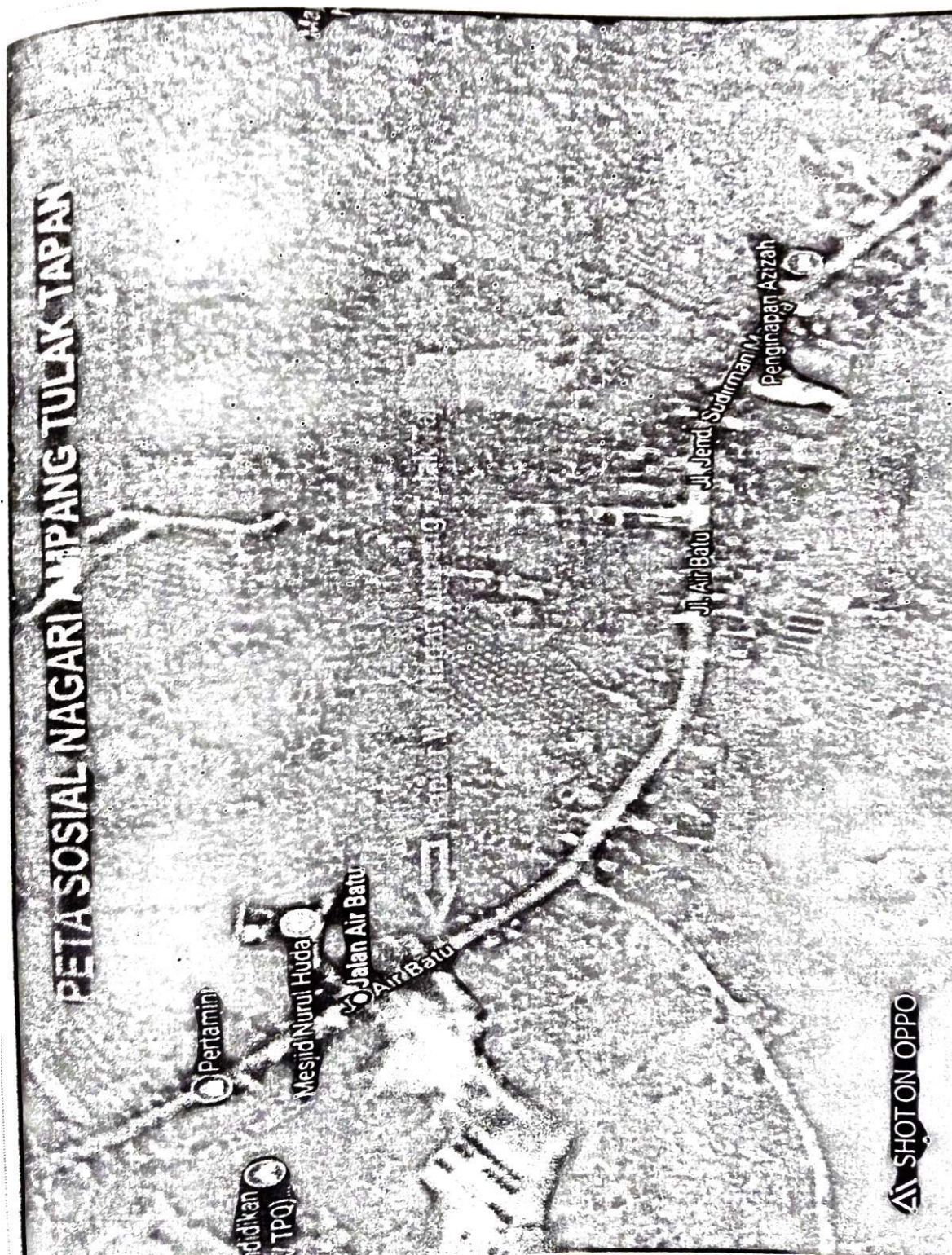
Page Number: 100

Scanned by Easy Scanner



Propinsi Sumatera Barat	
Kabupaten Pesisir Selatan	
Nagari Bukit Buai Tapan	
Dibuat oleh	
Pendamping	Tim Perumus
1. PDP	1. Darmansyah
2. PDTI	2. Leni marlina
3. PLD	3. Efendi
	4. Monica bin ilyas
	5. Asfomeri
	6. Zainul Arifin
	7. Ade
	8. Japrison
	9. Sasra mulyadi
	10. darlil
	11. Rosnimulyanti
Dirumuskan dalam	
Musyawarah Nagari	
Tgl:	
Bln:	
Thn:	
Disahkan oleh	
Bamus	Wali Nagari

PETA SOSIAL NAGARI AMPANG TULAK TAPAN



Bidang/ Sub Bidang / Kegiatan										Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan		
Bidang	Kode Rekrutir g	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan M		Sasaran/ Manfaat	Tahun						Jlh (Rp)	Sumber	Swakekelola	Kerjasama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga			
					Volume	Satuan		2017	2018	2019	2020	2021	2022								
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s				
	1.1													259 200 000	APB Nag	✓					
	1.1.1																				
	1.1.2																				
	1.1.3													1.317 600 000	APB Nag	✓					
	1.1.4													100 000 000	APB Nag	✓					
	1.1.5													360 000 000	APB Nag	✓					
	1.1.6																				
	1.2													150 000 000	APB Nag	✓					
	1.2.1													60 000 000	APB Nag	✓					
	1.2.2													50 000 000	APB Nag	✓					
	1.2.3													70 000 000	APB Nag	✓					
	1.2.3.1													100 000 000	APB Nag	✓					
	1.2.3.2													150 000 000	APB Nag	✓					
	1.2.3.3													50 000 000	APB Nag	✓					
	1.3																				
	1.3.1													60 000 000 000	APB Nag	✓					

Penyusunan/Pemetaan/Pemerintahan Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)	Nagari	6	Tahun	Perangkat Pemerintah/ Kepala pengelolaan desa
Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Nagari	6	Tahun	Emas Pemerintah nagari/Terpentu
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nagari	6	Tahun	Masy /
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Nagari	6	Tahun	Pemerintah nagari/Terpentu bi pelayanan masyarakat
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari / Pembahasan APBNag (Musnag, Musrenbangnag, Pro Musrenbangnag, dll beresifat reguler)	Nagari	6	Tahun	Perangkat nagari/terusun nya dokumen APB
Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, Rembug Warga, dll yang beresifat non-reguler sesuai kebutuhan Nagari)	Nagari	6	Tahun	Tercapainya inspirasi masy
Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RUPNag/RKP Nag, dll)	Nagari	6	Tahun	Terusun nya RPN nagari dg
Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag/APBNag Perubahan/LPI APBNag, dan seluruh dokumen terkait)	Nagari	6	Tahun	Terusun Apb nag secara rapi
Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Pemeliharaan Aset Nagari	Nagari	6	Tahun	Tercapainya pengelolaan
Penyusunan Kebijakan Nagari (Peraturan/Perwang, dll di luar dokumen Rencana Pembangunan / Keuangan)	Nagari	6	Tahun	Terbentuknya pernah nagari
Penyusunan Laporan Web Nagari / Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Nagari	6	Tahun	Perangkat Nagari/Perantag ing jawab terusun dg rapi
Pengembangan Sistem Informasi Nagari	Nagari	6	Tahun	Masy/informasi masyarakat
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari (Antar Nagari/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Nagari	6	Tahun	Perangkat/berjal in kerjasama yang baik
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwaha, PUKampung dan Pemilihan BAKUB (yang menjadi wewenang Nagari)	Nagari	6	Tahun	masy/pralaksana an dan sosialisasi pilwaha
Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Nagari	Nagari	6	tahun	terseleksi e lomba antar kelurahan
Sertifikasi Tanah Kas Nagari	Nagari	6	Tahun	pemerintah nagari, sertifikasi
Administrasi Pertanahan : Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan	nagari	6	tahun	masy Administasi an Pertanahan
Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Nagari	6	Tahun	Masy Fasilitas sertifikasi & Pk
Mediasi Konflik Pertanahan	Nagari	6	tahun	Masy
Penyuluhan Pertanahan	Nagari	6	Tahun	Masy-sosialisai
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2)	Nagari	6	tahun	Sekretariat pemda kecamatan / PBB

KABUPATEN TANJUNGPINANG														
No	Kategori	Nama Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	Tahun Pelaksanaan	Anggaran	Dana	Realisasi	Pengeluaran	Saldo				
2.1														
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-Formal milik Nagari (Bantuan Honor Pengajar, Pakain Seragam, Operasional, dst)	Nagari	6	Tahun	Terselenggaranya a Kesejahteraan Guru	√	√	√	√	√	√	150 000 000,00	Rp. Ngr.
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Nagari	6	Tahun	Terselenggaranya a Saran PAud	√	√	√	√	√	√	100 000 000,00	Rp. Ngr.
2.1.3		Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Nagari	6	kali	Mingkatkan kapasitas Masy	√	√	√	√	√	√	100 000 000,00	Rp. Ngr.
2.1.4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Nagari/Sanggar Belajar Milik Nagari	Nagari	4	kali	terpeliharanya sanggar belajar milik nagari	√	√	√	√	√	√	100 000 000,00	Rp. Ngr.
2.1.5		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-Formal milik Nagari	Nagari	4	kali	Terpeliharaan Saran TK dan Paud	√	√	√	√	√	√	100 000 000,00	Rp. Ngr.
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/alat peraga Edukatif (APE)	Nagari	3	kali	Kelancaran anak usta Dini belajar	√	√	√	√	√	√	100 000 000,00	Rp. Ngr.
2.1.6.1		Pembangunan Gedung TPA/TPSA	Air Batu/simp hulu	2	Unit	Mingkatkan minat anak dlm belajar agama	√	√	√	√	√	√	250 000 000	Rp. Ngr.
2.1.6.2		Pengadaan Meublier TPA/TPSA (Air-Papan Tulis, Rak Buku, Meja Guru dan Murid)	Air Batu/simp hulu	2	Paket	Kemudahan anak dlm belajar agama	√	√	√	√	√	√	50 000 000	Rp. Ngr.
2.1.6.3		Pengadaan Meublier TPA/TPSA (Air-Papan Tulis, Rak Buku, Meja Guru dan Murid)	Air Batu/simp hulu	2	Paket	Kemudahan anak dlm belajar agama	√	√	√	√	√	√	50 000 000	Rp. Ngr.
2.1.6.4		Pengadaan Perlengkapan TPA	Air Batu/simp hulu	2	Faket	Kemudahan anak dlm belajar agama	√	√	√	√	√	√	60 000 000	Rp. Ngr.
2.1.6.5		Pengadaan Meublier PAUD (Iqra, Papan Tulis, Rak Buku, Meja Guru dan Murid)	Air Batu/simp hulu	1	Paket	Menunjang minat belaj anak	√	√	√	√	√	√	20 000 000	Rp. Ngr.
2.1.6.6		Pengadaan Peralatan Perlengkapan Paud	Air Batu/simp hulu	1	Paket	Menunjang minat belaj anak	√	√	√	√	√	√	15 000 000	Rp. Ngr.
2.1.7		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/Sanggar Belajar Milik Nagari	Nagari	6	Tahun	terpeliharanya sanggar belajar milik nagari	√	√	√	√	√	√	75 000 000	Rp. Ngr.
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku-buku bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan / Taman Bacaan Nagari)	Nagari	6	tahun	termotivasi masyarakat gemar membaca	√	√	√	√	√	√	75 000 000	Rp. Ngr.
2.1.9		Pengembangan dan pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Nagari	2	kelompok	Pengembangan bakat belajar RTM	√	√	√	√	√	√	75 000 000	Rp. Ngr.
2.1.9.1		Pelatihan Tata Busana	Air batu/Simp Hulu	2	Kelompok	meningkatkan kapasitas Rymaja	√	√	√	√	√	√	60 000 000	Rp. Ngr.
2.1.9.2		Pelatihan Tata Boga	Air hatu/Simp Hulu	2	Kelompok	meningkatkan kapasitas IRT	√	√	√	√	√	√	60 000 000	Rp. Ngr.
2.1.9.3		Pelatihan Bordir	Air batu/Simp Hulu	2	Kelompok	meningkatkan kapasitas IRT	√	√	√	√	√	√	60 000 000	Rp. Ngr.

2.1.9.4	Pelatihan Tata Rias	Nagari	2	Kelompok	meningkatkan kapasitas IKT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APR 14g	✓		
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa/i Miskin/berkebutuhan	Nagari	6	tahun	Meningkatkan prestasi Siswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APR 14g	✓		
2.2																		
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari (PKN) /Polindes Mulk Nagari (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Nagari/perawat nagari, penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Nagari	6	tahun	meningkatkan kesejahteraan kader kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APR 14g	✓		
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, kader kesehatan, dll)	Nagari	6	tahun	terpenuhi kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	APR 14g	✓		
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll)	Nagari	6	kali	Meningkatkan kapasitas kader kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APR 14g	✓		
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Nagari	6	Tahun	Terlaksananya penyelenggaraan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APR 14g	✓		
2.2.5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Nagari	6	Tahun	Terlaksananya palang merah nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APR 14g	✓		
2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Nagari	6	Tahun	Terlaksananya KB nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APR 14g	✓		
2.2.7	Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Nagari	6	kali	Upaya kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APR 14g	✓		
2.2.8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Nagari	3	kali	Terpeliharanya sarana kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APR 14g	✓		
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Nagari	1.000	kali	Terpeliharanya sarana kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APR 14g	✓		
2.2.9.1	Pengadaan Perlengkapan Meubler Gedung POSKESPU	Nagari	5	Ls	Peralatan Poskespu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APR 14g	✓		
2.2.9.2	Pengadaan Meubler Poskespu	Nagari	1	Paket	terpenuhinya kebutuhan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APR 14g	✓		
2.2.9.3	Pengadaan Ambulan Kampung	Nagari	1	Unit	memenuhi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APR 14g	✓		
2.2.9.4	Pembangunan Gedung Posyandu	Nagari	1	Unit	pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APR 14g	✓		
2.2.9.5	Pengadaan Puskesmas Keliling	Nagari	1	Unit	pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APR 14g	✓		
2.3																		
2.3.1	Pemeliharaan Jalan Desa	nagari	30.000	km	Mempermudah akses Transportasi JMBAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	APR 14g	✓		
2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang	Nagari	2000	km	Mempermudah akses Transportasi JMBAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.000.000.000	APR 14g	✓		
2.3.3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Nagari	25000	km	Mempermudah akses Transportasi JMBAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000.000	APR 14g	✓		
2.3.4	Pemeliharaan Jembatan Mulk Nagari	Nagari	5	bh	Mempermudah akses Transportasi JMBAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000	APR 14g	✓		
2.3.5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Nagari (Gorong gorong, selokan, Box / Slab, Curver, Drainase, Prasarana Jalan Lain)	Nagari	20	unit	Mempermudah akses Transportasi JMBAY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APR 14g	✓		

[illegible]

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	3.1.3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Koordinasi Pembinaan Kesenian, kesetiaan, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat atau instansi pemerintah daerah di 1 skala lokal nagari)	Nagari	6	Tahun	Masy/kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APB NAG	✓
	3.1.4		Pelatihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal nagari	Nagari	6	Tahun	ingkatkan kapasitas masy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APB NAG	✓
	3.1.5		Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal nagari	Nagari	6	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APB NAG	✓
	3.1.6		Bantuan hukum untuk aparat nagari dan masyarakat miskin	Nagari	6	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APB NAG	✓
	3.1.7		Pelatihan / Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat	Nagari	6	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APB NAG	✓
	3.1.7.1		Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Hukum	Nagari	1	Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APB NAG	✓
	3.1.7.2		Penyuluhan tentang Hukum	Nagari	1	Kegiatan	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000	APB NAG	✓
	3.2	KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN																
	3.2.1		Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat nagari	Nagari	6	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓
	3.2.2		Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil nagari di tingkat kecamatan dan kabupaten / kota	Nagari	6	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓
	3.2.3		Penyelenggaraan festival kesenian, adat / kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat nagari	Nagari	6	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓
	3.2.4		Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik nagari	Nagari	6	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5		Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan / rumah adat / keagamaan milik nagari	Nagari	6	Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5.1		Pembangunan Gedung Sanggar Seni Budaya Nagari	Air Batu/simp. hulu	2	Unit	Meningkatkan prestasi masy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5.2		Pengadaan Bendera dan atau Marawu	Air Batu/simp. hulu	400	helai	Tertibn Masy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5.3		Pengadaan Peralatan Kesenian	Air Batu/simp. hulu	2	paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5.4		Insentif Urang Siak dan Pengurus Masjid	Nagari	6	orang	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	3.2.5.5		Bantuan Peralatan Kesenian Rebana	Air Batu/simp.	2	Kelompok	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5.7		Bantuan Insentif Garim Masjid / Mushola	Air Batu/simp. hulu	2	orang	Menambah kesejahteraan garim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5.8		Bantuan Pakatan Seragam Pengurus Masjid / Mushola	Nagari	10	orang	Kewajiban pengurus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5.12		Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Agama bagi Masyarakat	Nagari	1	paket	meningkatkan kapasitas masy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APB NAG	✓
	3.2.5.13		Pembinaan Kelompok Remaja Masjid	Nagari	2	Kelompok	meningkatkan kan kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APB NAG	✓
	3.3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI																
	3.3.1		Pengiriman kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil nagari di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota	Nagari	2	kelompok	Tercapainya prestasi pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APB NAG	✓
	3.3.2		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat nagari	Nagari	1	Paket	Tercapainya prestasi pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APB NAG	✓
	3.3.3		Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat nagari	Nagari	4	kegiatan	Tercapainya prestasi pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APB NAG	✓
	3.3.4		Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik nagari	Nagari	6	kali	terpeliharanya sarana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APB NAG	✓

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



Scanned by Easy Scanner

**BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN TIM REVISI RPJM DAN PENETAPAN RPJM
NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
ANGGARAN 2017-2022**

Berkaitan dengan Rapat Pembentukan Tim Perumus RPJM dan penetapan RPJM Nagari di Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampik Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, pada :

Hari dan tanggal
Jam
Tempat

: Selasa, 30 Juli 2019
: 13.30 s/d Selesai

: Kantor Wali Nagari Ampang Tulak Tapan

Telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Perumus Revisi RPJM dan penetapan RPJM Nagari Anggaran 2017-2022 Nagari Simpan Gunung Tapan yang dihadiri oleh Ninik Mamak, Pemuda Nagari, Barnas, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Pembentukan Tim Perumus Revisi RPJM dan penetapan RPJM Nagari Ampang Tulak Tapan, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui dan memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhirdari rapat ini yaitu :

Tim Perumus RPJM
Pemrina : Darmansyah
Ketua : Leni Marlina
Wakil Ketua : Efendi

Anggota :

1. Darli
2. Monica Bin Ilyas
3. Asfo Meri
4. Zainul arifin
5. Ade
6. Japrisson
7. Sasra Mulyadi

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya :

**BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH REVISI RPJM
NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
ANGGARAN 2017-2022**

Hubungan dengan Rapat Musyawarah Penyusunan RPJM Nagari di Nagari Ampang Tulak
Kecamatan Basa Ampak Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Barat, pada :

Hari dan tanggal
Jam
Tempat

: Kamis, 24 Agustus 2019
: 13.30 s/d Selesai
: Kantor Wali Nagari Ampang Tulak Tapan

lah diselenggarakan Rapat Musyawarah Revisi RPJM Nagari Anggaran 2017-2022 Nagari
mpang Tulak Tapan yang dihadiri oleh Staf Camat, Ninik Mamak, Pemuda Nagari, Bamus,
PLD, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir
lampir.

telah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Musyawarah Penyusunan RPJM Nagari
mpang Tulak Tapan, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui dan memutuskan
beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari rapat ini yaitu : Sebagaimana yang terlampir
lam RPJM Nagari Ampang Tulak apan

emikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat

BERITA ACARA KESepakatan BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS
KESepakatan BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
TENTANG
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) TAHUN 2017 – 2022
DOKUMEN

di hari ini Minggu tanggal Dua puluh lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami mengadakan pertemuan di bawah ini :

DARMANSYAH : Wali Nagari Ampang Tulak Tapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Ampang Tulak Tapan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

LILI SYARYANI M.Pd : Ketua Bamus Nagari Ampang Tulak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari) Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017 - 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017 - 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017 - 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Basa Ampik Balai Tapan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
NAGARI AMPANG TULAK TAPAN

1. Ketua	: LILI SYARYANI M.Pd	()
2. Wakil Ketua	: BUDI SUSANTO	()
3. Sekretaris	: MARTIAS	()
4. Anggota	: MARDAMSYAH	()
5. Anggota	: ROMI GUSPAIDI	()

**BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN REVISI RPJM
NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
ANGGARAN 2017-2022**

Berkaitan dengan Rapat Penetapan RPJM Nagari di Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, pada :

Hari dan tanggal : Minggu 25 Agustus 2019
Jam : 10.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Ampang Tulak Tapan

Telah diselenggarakan Rapat Penetapan Revisi RPJM Nagari Anggaran 2017-2022 Nagari Ampang Tulak Tapan yang dihadiri oleh Ninik Mamak, Pemuda Nagari, Bamus, PD, PLD, Tokoh Masyarakat dan unsur lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Penetapan Revisi RPJM Nagari Ampang Tulak Tapan, selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui dan memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari rapat ini yaitu : Sebagaimana yang terlampir dalam RPJM Nagari Ampang Tulak Tapan

Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya :

Ampang Tulak, 25 Agustus 2019

Ketua Bamus

Wali Nagari





KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
NOMOR : 11 /Kpts/ WN-ATT/ VII-2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (Revisi RPJM)
NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN ANGARAN 2019

WALI NAGARI AMPANG TULAK TAPAN

Membaca : - Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2010 Nomor : 414.2/1408/PMMD tanggal 31 Maret 2010

Menimbang : - Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahunan (RPJM) Nagari Ampang Tulak Tapan merupakan jabatan dari Revisi RPJM yang menentukan arah kebijakan Wali Nagari sesuai dengan Visi dan Misi Wali Nagari 6 (enam) tahun

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang

7. Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

12. Surat edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor :414.2/563/KM/DPMDPPKB-PS/I/2019 tentang Revisi Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah Nagari Tahun 2017-2022 dan Rencana kerja pemerintah nagari tahunan

Memperhatik : Berita Acara Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari Ampang Tulak Tapan dilaksanakan Pada hari Minggu, 30 Juli 2019

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama- nama personil Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari Ampang Tulak Tapan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari Ampang Tulak Tapan sebagaimana tercantum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan penjelasan Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari

- b. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Nagari
- c. Penyusunan Rancangan RPJM Nagari
- d. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RPJM Nagari

KETIGA

Tim Penyusun RPJM Nagari Ampang Tulak Tapan harus benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai ketentuan berlaku

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Ampang Tulak Tapan
Pada Tanggal : 30 Juli 2019
WALINAGARI AMPANG TULAK TAPAN



Tembusan:

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Kepala Inspektora: Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 4. Camat Basa Ampek Balai Tapan
- 5. Ketua Barmus Ampang Tulak Tapan
- 6. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG TULAK TAPAN
 Nomor : 11 / Kpts/ WN- ATT/ VII-2019
 Tanggal : 30 Juli 2019
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM Revisi RPJM

Susunan Tim Penyusun Revisi RPJM

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DARMANSYAH	Air batu Tapan	PEMBINA
2	LENI MARLINA,S.Pd	Air BatuTapan	KETUA
3	EFFENDI	Simpang Hulu Tapan	WAKIL KETUA
4	DARUL	Air Batu Tapan	ANGGOTA
5	MONICA BIN ILYAS	Simpang Hulu Tapan	ANGGOTA
6	ASFO MERI	Simpang Hulu Tapan	ANGGOTA
7	ZAINUL ARIFIN	Air BatuTapan	ANGGOTA
8	ADE	Simpang Hulu Tapan	ANGGOTA
9	JAPRISON	Air batu Tapan	ANGGOTA
10	SASRA MULYADI	Air batuTapan	ANGGOTA
11	ROSNI MULYANTI	Air batu Tapan	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ampang Tulak Tapan
 Pada Tanggal : 30 Juli 2019
WALI NAGARI AMPANG TULAK TAPAN



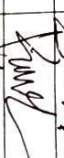
DAFTAR HADIR

Hari :
 Tanggal :
 Acara :
 Tempat :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Darici	Air batu	Kep. Keam. pny	
2	AIRUDAN NDE	Smp. Hulu	Kep. K. m. pny	
3	Zulkarnain.	" - "	Staf. K. m. pny	
4	SABRI	AIR BAZU	AKOROTX	
5	MASRI	Air Pan	CPHX	
6	JAPRISAN	- " -	Amph. Lepun	
7	APRIS	- " -	- " -	
8	JUANANI	Smp. Hulu	Staf. M. pny	
9	RIDI SUSANTI	AIR BANI	Staf. M. pny	
10	LINA SWATI	AIR BATU	Staf. M. pny	
11	Keke Prisdan Iora	Air Batu	Staf. M. pny	
12	Monica Bin Iltas	Air Batu	Staf. M. pny	
13	DELORITA ANDIAN	AIR BATU	Staf. M. pny	
14	Rosni Mulyanti	Smp. Hulu	Staf. M. pny	
15	NINA MARIANA	Air Batu	Staf. M. pny	
16	LENI MARLINA	AIR BATU	Staf. M. pny	
17	EKA SUSANTI	Air Batu	Staf. M. pny	
18	DEKI FARI	Air Batu	Staf. M. pny	
19	Chania Darnah	Air Batu	Staf. M. pny	
20	Rafra	Air Batu	Staf. M. pny	
21	Fahri Yoni	Smp. Hulu	Staf. M. pny	

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :
 Jam :
 Acara :
 Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	AFULIZAN	Comai	Ti. Pundok	
2	Kharun	Kasi Pu	g. pu	
3	Safiqul H	Kasi Pu	Kr. Caman	
4	Piska	Kasi Kessos	lat. Camat	
5	Zulwan'Zel	POTI	Is. Tapan	
6	Gusoni Butagari	DDP	Imkayura	
7	Sabri	Masparat	Air Batu	
8	Kahar	Masparat	Air Batu	
9	RQBCHA	masparat	S. Durian	
10	Barwah's	masparat	Air Batu	
11	Helmi	Masparat	Sungai Durian	
12	Mufadi	Masparat	Sungai Durian	
13	Darus	Masparat	Air Batu	
14	Bare	Masparat	Air Batu	
15	Rahudossan	Masparat	Air Batu	
16	Abdul Gafur	Masparat	S. Durian	
17	Agil	Masparat	Air Batu	
18	Harman	Masparat	Air Batu	
19	ANDI Suto	Masparat	Air Batu	
20	Supar	Masparat	S. Durian	

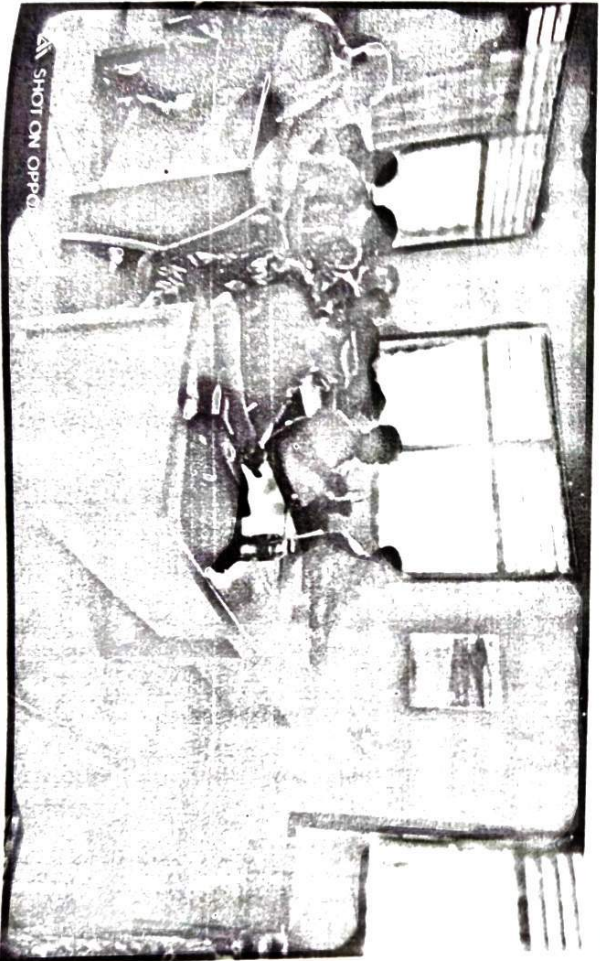
DAFTAR HADIR

WAKIL/TANGGAL :
 AM :
 ACARA :
 TEMPAT :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	AFUZEN	Carrot Bros Rp.	D pondok	
2.				
3.	JENI MURUGAN	Sole. 1000	Sungai Jati	
4.	Pharman	Wan Panti	Ind. Cui	
5.	Syafa Umm	Kas. fund west	M. Comar	
6.	PSTFA	Kasi kessor	- u -	
7.	Budi Setiarto	Banars	Sung. Hulu	
8.	Erandi	CPMN	Sung. Hulu	
9.	AFIRUDIN	MP. Sim. Hulu	Sung. Hulu	
10.	Syarifur	Par. Maroon dlat	Sung. Hulu	
11.	Zedual aripin	VP CIP. Baru	Alip. Danti	
12.	DORVAN KIRIM	PPF	Indra Dura	
13.	Z. Arifin	W. R. K. K. K.	Ind. K. K. K.	
14.	APRIS	P. Mac. P. P. P.	Ind. K. K. K.	
15.	HTIN Ayri	Letim. P. P. P.	Ind. K. K. K.	
16.	MADAMARAT	P. P. P. P. P.	Ind. K. K. K.	
17.	Aljo Mieri	Ind. K. K. K.	Ind. K. K. K.	
18.	Koni Gopate	S. P. P. P.	Ind. K. K. K.	
19.	DALIC	Kan. Pen	Ind. K. K. K.	
20.	Induman-2d	PO	Ind. K. K. K.	
21.				



▲ SHOT ON OPPO



▲ SHOT ON OPPO

